

Draft

PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN DI ACEH

Ditulis oleh :
Sugiarto A Santoso dan Ferry Yuniver S

Didukung oleh:
MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia)
UNDP (United Nations Development Programme)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Prolog | i |
| Bagian 1 | |
| Aceh Masa Lalu: Terbuka dan Pluralis | 1 |
| 1.1 Keseimbangan Gender: Masa Keemasan Aceh | 4 |
| 1.2 Beban Ganda Perempuan | 9 |
| 1.3 Kekerasan Terhadap Perempuan Semasa Konflik | 11 |
| 1.4 Inong Bale: Salah Satu Bentuk Gerakan Perempuan Aceh | 15 |
| 1.5 Kisah-Kisah Perjuangan Perempuan Aceh | 19 |
| Bagian 2 | |
| GERAKAN DAMAI PEREMPUAN ACEH | 24 |
| 2.1 Perjuangan Perempuan Masa DOM | 26 |
| 2.2 Inisiatif Damai melalui Duek Pakat Inong Aceh (DPIA-I) tahun 2000 | 29 |
| 2.3 Kontribusi Perempuan dalam Jeda kemanusiaan 2000 | 37 |
| 2.4 Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) Pada 9 Desember 2002 | 42 |
| Bagian 3 | |
| Merajut Benang Merah Perdamaian | 44 |
| 3.1 Inisiator Damai Yang Terlupakan | 45 |
| 3.2 Pelucutan Senjata dan Proses Reintegrasi | 46 |
| 3.3 Kontribusi Perempuan Aceh dalam Perumusan UU PA | 50 |
| Bagian 4 | |
| Mengisi Pembangunan dengan Perdamaian | 54 |
| 4.1 Duek Pakat Inong Aceh (DPIA-II) Tahun 2005 | 54 |
| 4.2 Perempuan Dalam Reintegrasi di Aceh | 56 |
| 4.3 Peran-peran Perempuan Aceh dalam Mengisi Perdamaian | 59 |
| Daftar Bacaan | * |

Bagian 1

Aceh Masa Lalu: Terbuka dan Pluralis

Mengingat kata-kata yang dilontarkan Aguswandi¹, dikatakannya, bila dibayangkan dalam sebuah peta, Aceh terletak di paling barat Indonesia atau kilometer Nol di Kota Sabang yang menandakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Indonesia. Bila dibayangkan dalam peta dunia, Aceh merupakan daerah laut yang strategis dan terletak pada lintas perdagangan dunia yang masuk ke Nusantara. Pada masa-masa lalu Aceh telah menjadi tempat persinggahan bagi para jamaah haji di Nusantara yang ingin berangkat ke tanah suci Mekah. Begitupun sebaliknya, kaum pedagang dari negeri timur diantaranya India dan negara-negara Arab menjadikan Aceh sebagai titik masuk utama dalam membangun kerjasama kebudayaan dan perdagangan. Begitu strategisnya Aceh sehingga diberi julukan Bumi Serambi Mekah.

Karakter daerah yang sedemikian membentuk Aceh menjadi wilayah yang terbuka bagi siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam urusan perdagangan dan kebudayaan. Interaksi yang tinggi dengan dunia luar ini, pada abad ke-13 hingga abad ke-16, menyebabkan Aceh mengalami perkembangan kebudayaan dan seni susastra yang bernilai tinggi. Dan perkembangan kebudayaan ini tercatat dalam sejarah pertempuran melawan kolonial Belanda. Ada banyak karya sastra berupa kitab-kitab, hikayat dan sastra tutur. Karya dalam bentuk tulisan umumnya menggunakan tulisan Jawi, bahasa Melayu dan Arab. Sedangkan sastra lisan umumnya menggunakan bahasa Aceh (setempat) karena lebih komunikatif saat berkomunikasi langsung dengan pendengarnya.

Beberapa karya legendaris dari Aceh lahir pada masa ini dan setiap karya punya kekuatan dan ciri khas tersendiri. Hikayat adalah karya yang menonjol pada jaman ini. Hikayat-hikayat yang memiliki kekuatan dan bertahan sampai sekarang, antara lain adalah *Syair Perahu* karya Hamzah Fanshuri, *Bustanul As-Salatin* karya Nuruddin Arraniry, dan *Hikayat Prang Sabil* karya Tgk Chik Pante Kulu. Selain itu juga ada *Hikayat Malem Dagang*, *Hikayat Pocut Muhammad*, *Hikayat Putroe Bungsu* dan beberapa hikayat yang tidak diketahui penulisnya. Karya sastra tulisan lebih sedikit dibandingkan dengan karya sastra tutur. Karya sastra tutur ini lebih merakyat dan berkembang pesat. Hikayat yang tidak ditulis tetapi dituturkan secara spontan dan dihapalkan cukup banyak. Hampir semua orang di Aceh pandai bertutur secara spontan. Karya-karya Nurrudin Arraniry terkenal pada masa Aceh dipimpin oleh Ratu Safiatuddin, putri dari Iskandar Muda, menggantikan suaminya Iskandar Thani 1614-1675.

Jauh sebelum Ratu Safiatuddin berkuasa, sebenarnya merupakan masa-masa perempuan sangat menonjol dalam memegang tampuk kekuasaan. Hal ini sekaligus membantah bahwa akar budaya Aceh adalah patrilineal, karena selama hampir 200-an tahun perempuan mendapat tempat yang proporsional dalam pengambilan keputusan di Aceh. Pada awal tahun 1400-an misalnya, Aceh mempunyai sosok pemimpin perempuan dari

¹ Terlontar pada sebuah seminar pada awal tahun 2008 yang dilaksanakan Mitra Sehati Perempuan Indonesia (MISPI) bagi legislatif perempuan Aceh.

kalangan Sultanah yang gencar memperjuangkan isu kesetaraan gender seperti Nahrasiah (meninggal pada 1428) menggantikan ayahnya Sultan Zainal Abidin. Kemudian pada akhir tahun 1600 muncul sosok perempuan yang menjadi laksamana (pemimpin perang di laut) yaitu Keumalahayati yang diangkat oleh Sultan Alaidin Riayatsyah. Latar belakang pengangkatan ini mempertimbangkan kompetensi dalam bertempur dan unsur mencegah terjadinya kudeta terhadap Riayatsyah. Bahkan pada masa ini Ketua Dewan Rahasia Kerajaan mirip dengan Badan Intelijen Negara dipegang oleh perempuan yaitu Po Cut Limpah. Selanjutnya masih banyak lagi sederetan perempuan yang berhasil tercatat memegang tampuk kekuasaan.

Jaman keemasan di Aceh tercapai ketika Aceh menjadi wilayah terbuka baik perdagangan maupun pertukaran kebudayaan. Karena wilayah Aceh yang terbuka itu maka wilayah ini juga menerima berbagai budaya yang berbeda yang ditandai dengan beragamnya suku bangsa atau masyarakat yang pluralis. Pluralitas dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa sub etnis dalam Aceh, paling tidak terdapat 8 sub etnis diantaranya: sub etnis Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, dan Tamiang. Kedelapan sub-etnis tersebut juga mempunyai sejarah asal-usul dan budaya yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain.

Kisah transaksi perdagangan yang terjadi antar suku bangsa di Aceh pada masa lalu memunculkan sisi lain dalam historikal Aceh. Kehadiran para bangsa-bangsa kemudian menimbulkan akulturasi serta membentuk "entitas baru Aceh", perubahan terjadi dalam tata nilai sosial-budaya, tatanan ekonomi, serta tatanan politik-kekuasaan. Satu bukti (sejarah) empirik, menunjukkan seluruh proses tersebut tidak lepas dari pergolakan dan perlawanan. Baik itu terjadi dari jaman kesultanan Aceh, kolonial Belanda serta masa ke-Indonesiaan.

Meski dalam buku ini tidak menjelaskan lebih detail tentang proses perdagangan sebagai titik masuk akulturasi pluralitas masyarakat Aceh, paling tidak deskripsi tersebut menggambarkan kondisi wilayah yang strategis, pergolakan yang terjadi sampai pada terjadinya pluralitas dalam masyarakat Aceh. Contoh pluralitas dan sebarannya dapat dilihat dari sub-etnis *Aneuk Jamee*, sub etnis ini sangat dominan jika berkunjung di kawasan Aceh Selatan. Umumnya, masyarakat dalam sub etnis ini merupakan pendatang yang berasal dari Sumatera Barat (etnis Minangkabau). Dengan demikian, budaya subetnis Aneuk Jamee sangat mempunyai kemiripan dengan budaya etnis Minangkabau.

Demikian pula dalam dokumen Laporan Gubernur Aceh yang diterima sebagai Lampiran Surat Sekretaris Pemerintahan Umum tertanggal 30 Juni 1887 No. 956 dan dimuat dalam majalah TBG (1889) dengan judul "*Lets Omtrent de Oosprong Van Het Atjesche Volk en den Toestand Onder het Voormalig Sultanaat in Atjeh*" (Serba-serbi Tentang Asal-Usul Bangsa Aceh dan Keadaan Pada Masa Pemerintahan Kesultanaan di Aceh). Disebutkan bahwa menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut *ureueng manteue* yang didominasi oleh orang-orang Batak dan juga etnis Gayo. Untuk menguatkan pendapat ini, dijelaskan bahwa di dalam adat Batak dan Gayo, masih terdapat unsur-unsur dan kata-kata yang juga dijumpai dalam bahasa Aceh, meskipun dengan ucapan yang telah berubah di samping unsur-unsur formatif bahasa Batak dan Gayo.

Dari sisi Aceh sebagai masyarakat yang terbuka merupakan korelasi dari plural itu sendiri. Letak wilayah dimana merupakan kawasan strategis pedagang dan memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai salah satu faktor utama. Bukan saja terbuka dan terjadi pluralitas antar etnis disekitar kawasan Aceh, namun juga dari kawasan yang sangat jauh. Hal ini diperkuat pula oleh salah satu tulisan seorang ulama Aceh terkenal pada abad XIX, yaitu Teungku Kutakarang (meninggal 1895), dalam karyanya *Tadhkirat Al-Radikin* menyebutkan bahwa orang Aceh terdiri atas tiga pencampuran darah yaitu Arab, Persi, dan Turki. Demikian pula pendapat lain oleh Julius Jacob, seorang sarjana Belanda dalam karyanya *Het Familie en Kampongleven Op Groot Atjeh* (1894) (Kehidupan Kampung dan Keluarga di Aceh Besar). Jakob mengatakan bahwa orang Aceh adalah suatu *anthropologis mixtum*, suatu percampuran darah yang berasal dari pelbagai suku bangsa pendatang. Ada yang berasal dari Semenanjung Melayu, Melayu-Minangkabau, Batak, Nias, India, Arab, Habsyi, Bugis, Jawa, dan sebagainya. Dapat disebutkan pula bahwa sultan-sultan terakhir yang memerintah di Kerajaan Aceh secara berturut-turut semenjak Sultan Alaidin Ahmadsyah (1727) sampai dengan Sultan Alaidin Mahmudsyah (1870-1874) dan yang terakhir Sultan Muhammad Daudsyah (1874-1903) adalah berasal dari Bugis.

Deskripsi tersebut diatas menunjukkan bahwa Masyarakat Aceh sesungguhnya merupakan pencampuran etnik dan peradaban poros timur (negara-negara Arab) dan Asia. Baik melalui proses transaksi ekonomi, transaksi sosial hingga proses kawin-mawin, maupun tatanan politik-kekuasaan kawasan kemudian. Hal ini berkontribusi besar dalam membentuk karakter-budaya-peradaban Masyarakat Aceh hingga kekinian.

Sangat disadari dan dipahami, proses keterbukaan dan pluralitas tersebut bukan sesuatu yang berjalan linier. Lazimnya proses percampuran dan proses transaksi ekonomi, turut memunculkan akulturasi, transformasi atas tutur, bahasa serta perilaku masyarakat Aceh. Proses yang lebih landai mendorong transaksi sosial-ekonomi (perdagangan) berjalan saling menguntungkan. Namun juga tidak bisa terhindarkan, fenomena penguasaan ekonomi seperti yang dilakukan Belanda lebih besar menghadirkan penggunaan alat perang untuk proses penguasaan dan penghisapan. Fenomena kedua ini, juga memiliki andil besar pada pembentukan karakter masyarakat Aceh yang menggunakan jalur perang dari masa kesultanan hingga kini.

Pada saat fenomena penghisapan atas ekonomi terjadi, pada saat itulah Aceh menjadi wilayah yang tertutup dan semakin lama semakin menguat semangat perlawanan terhadap rejim penghisap. Ketika Aceh menjadi semakin tertutup maka keterlibatan perempuan pun seturut menjadi surut dan mengambil tempat yang tidak sederajat dengan laki-laki. Proses surutnya perempuan dari kancah tata pemerintahan di Aceh pun tidak serta merta menghilang begitu saja. Beberapa contoh seperti yang dilakukan oleh Cut Nyak Dien dan Cut Meutia menunjukkan adanya peran penting perempuan seperti menjadi pemimpin perang ketika melawan Belanda.

1.1 Keseimbangan Gender: Masa Keemasan Aceh

Ungkapan tentang kerentanan posisi perempuan Aceh juga diungkap oleh Ridwan H Mukhtar (2007). Dalam sebuah artikel berjudul "Perempuan Aceh: Dari Peran Domestik ke Ruang Publik" menyebutkan bahwa "*kedudukan perempuan tak luput dari pelecehan.*

Kebenaran sepihak oleh kaum pragmatis yang bercokol di ranah kekuasaan negara, agama, sosial, ekonomi seringkali meminggirkan perempuan. Politik kekuasaan terlanjur menafikan perempuan sebagai sebuah entitas budaya yang sejajar dengan laki-laki. Padahal seharusnya perempuan adalah benteng pertahanan yang pertama dan yang terakhir bagi kekuasaan yang humanis, agar kemanusiaan tidak punah” .

Dimanapun penyempitan peran dan pembungkaman suara perempuan kerap terjadi. Hal ini terjadi dalam sejarah perempuan di Aceh. Mengingat orang-orang Aceh lahir dari ibu yang mempunyai entitas dan identitas unik yang bermutu tinggi dimana salah satunya adalah hasil asimilasi gen dan budaya yang alamiah dan politis dari benturan berbagai peradaban baik pada masa masuknya Islam maupun sebelum itu. Seperti dijelaskan di atas bahwa peran dan posisi Perempuan Aceh pernah mengalami masa keemasannya pada abad ke-13 hingga ke-16. Bukti-bukti dokumentasi menunjukkan bahwa beberapa perempuan Aceh menjadi pemimpin kerajaan, pemimpin perang, pemimpin wilayah di bawah kerajaan dan lain-lain yang bersifat penguasaan. Penyempitan peran dan pembungkaman suara terjadi disebabkan pergolakan yang menghasilkan peperangan yang terus menerus, yang kemudian menyebabkan dampak negatif terhadap perempuan.

Dalam sejarah panjang Aceh, sepak terjang perempuan Aceh merupakan salah satu elemen yang menarik. Dalam sejarah kontemporer Indonesia, sangat jelas menyebutkan Cut Nyak Dien dan Cut Meutia menjadi bagian dari sejarah kepahlawanan dalam mengusir penjajahan dan ketertindasan. Perempuan menjadi contoh dalam melawan bentuk-bentuk penindasan dan penghisapan sumber daya. Demikian pula dalam buku-buku sejarah tentang Aceh. Posisi perempuan Aceh tidak bisa dilepas dalam berkontribusi membentuk karakter dan tatanan masyarakat Aceh.

Banyak posisi yang pernah diraih oleh perempuan Aceh, bahkan menduduki hingga level otoritas kekuasaan. Baik pada masa kesultanan, kolonial hindia Belanda hingga dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Hal tersebut merupakan manifestasi perempuan dalam upayanya membela hak-hak masyarakat Aceh, secara umum, juga pembelaan terhadap penganiayaan-pelanggaran atas hak perempuan. Tercatat dalam lembaran sejarah, bahwa kontribusi yang diberikan perempuan Aceh hingga pada posisi-posisi penting yang umumnya kebanyakan dikuasai kaum Adam. Atas hal tersebut, tidak ada yang meragukan kemampuan perempuan Aceh, dalam merancang strategi dan memimpin pasukan perang di daratan dan di laut dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Ini menjadi salah satu bukti empirik. Tidak pula dapat dipungkiri dari sisi kemampuan dalam memimpin sebuah tatanan politik dan kenegaraan, perempuan Aceh banyak telah berkiprah hingga pada posisi tertinggi dalam ketata kenegaraan.

Tokoh perempuan yang mewarnai sejarah Aceh dan berkontribusi terhadap perubahan sosial di Aceh dapat dilihat dalam sejarahnya. Salah satu hal yang sering diungkap adalah jiwa kepahlawanan yang tidak kering dari perempuan-perempuan Aceh. Atas hal ini Belanda juga mengangkat tabik, kagum terhadap kepahlawanan perempuan Aceh tersebut, dalam buku *"Gedenboek van het korp Marechausse van Aceh en Onderhoorigheden"*. Dalam salah satu bagian buku itu Belanda menulis; *"De heldhaftigheid van den Atjeher, welke hij gedurende den Atjeoorlog aan den om legde bij den strijd om zijn land te verdedigen, heeft de eebied van de Merechauss*

afgedwongen en tevens hun bewondering voor zijn moed, doodsverachting, zelfopoffering en uithoudingsvermogen" (Kepahlawanan orang Aceh yang diperlihatkannya masa perang Aceh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan tanah airnya, telah menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap keberaniannya, sikap tak gentar menghadapi maut, pengorbanan diri dan daya tahannya). Berikut beberapa tokoh perempuan di Aceh yang berkontribusi atas perubahan-perubahan di Aceh.

Nahrasih, Ratu Pertama di Aceh, sejak Kerajaan Samudra Pasai (abad ke 15) peran wanita sudah sangat menonjol. Nahrasih adalah ratu pertama di Aceh yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai atas konsep kesetaraan jender, jauh sebelum Kartini (1879-1904) di Jawa memperjuangkan hak-hak kaumnya. Nahrasih naik ke tampuk pemerintahan pada tahun 1408 dan meninggal pada 1428 menggantikan ayahnya Sultan Zainal Abidin. Ia mendapatkan kekuasaan itu secara terhormat karena seluruh masyarakat dalam hal ini kerabat kerajaan sepakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada seorang wanita, tanpa mempersoalkan adanya analogi bahwa wanita yang tidak bisa jadi imam shalat sekaligus tidak bisa memimpin negara. Di bawah kepemimpinan Putri Nahrasih inilah kemudian tradisi pemerintahan perempuan berlanjut di Aceh.

Laksamana Keumalahayati, menjelang masa keemasannya, di Kerajaan Aceh tampil seorang perempuan dengan peran sangat penting, yaitu Keumalahayati, yang diangkat menjadi laksamana oleh Sultan Alaidin Riayatsyah (1589 -1604). Sebuah riwayat menyebutkan, alasan pengangkatan Keumalahayati sebagai laksamana, karena selain layak dan berpengalaman di laut, kala itu Riayatsyah sudah tidak mempercayai lagi kaum lelaki. Di usianya yang tua (80 tahun), sultan amat risau jika panglima armada dipimpin lelaki karena berpotensi merampas kekuasaan. Hanya wanita yang mampu mengamankan dan menyamankan sultan dari bayang-bayang kudeta.

Riayatsyah, Riayatsyah adalah tokoh pembagi kekuasaan antara lelaki dengan wanita. Sebab, selain untuk jabatan laksamana, sultan juga mengangkat Po Cut Limpah menjadi Ketua Dewan Rahasia. Tugas Dewan Rahasia yang mirip dewan penasihat sekaligus badan intelijen negara memberi informasi penting kepada sultan. Keputusan-keputusan strategis kerajaan bermula dari dewan yang dipimpin Po Cut Limpah ini. Mitos bahwa pada wanita tak boleh disimpan rahasia, dengan sendirinya terbantahkan.

Safiatuddin, tampilnya Safiatuddin --putri Iskandarmuda-- memimpin Aceh setelah mangkat Iskandar Thani (suaminya), semakin mempertegas kedudukan dan integritas perempuan, apalagi ketika Riayatsyah berkesimpulan: bahwa lelaki tidak bisa dipercaya, sehingga dia memilih Keumalahayati sebagai laksamana.

Safiatuddin yang memerintah dari tahun 1614 sampai 1675, dilukiskan sebagai ratu yang cerdas, malah lebih cerdas dari para pendahulunya -termasuk dari kalangan pria. Di jaman Safiatuddin berkembang ilmu pengetahuan yang ditandai oleh terbitnya buku-buku penting karya para ulama, setelah mereka dikirim ke India dan Timur Tengah. Nuruddin Ar Raniry yang terkenal itu berkarya di masa sang ratu. Yang lebih penting, masa kekuasaan wanita ini jauh lebih lama dibandingkan dengan para sultan sebelum dan sesudahnya. Dengan masa berkuasa selama 34 tahun, bahkan Safiatuddin melebihi

Soeharto.

Bertahannya di tampuk pemerintahan, antara lain karena dia tahu menjaga keseimbangan semua komponen masyarakat, terutama para elitnya. Dia melibatkan ulama menjadi penasihat istana, tradisi ini sampai kini masih berlangsung di Aceh. Sekarang ini, Pemerintahan Aceh memasukkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai anggota Muspida, yang tidak ada di provinsi, atau kabupaten/kota di luar Aceh. Inilah konsep gagasan seorang wanita yang berawal dari adanya ketulusan menempatkan wanita di pusat-pusat kekuasaan.

Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dilahirkan di Lampadang, Aceh pada tahun 1850. Dibesarkan dalam kondisi dan suasana yang memprihatinkan hubungan antara kerajaan Aceh dan Belanda. Menikah dalam usia muda dengan Teuku Ibrahim Lamnga. Bulan Desember 1875, Lampadang diduduki oleh Belanda. Cut Nyak Dien mengungsi ke tempat lain berpisah dengan suami dan ayahnya. Suaminya Teuku Ibrahim Lamnga tewas dalam pertempuran di Gle Tarum bulan Juni 1878. Disitu Cut Nyak Dien bersumpah hanya akan kawin dengan laki-laki yang bersedia membantu untuk menuntut balas kematian suaminya.

Tahun 1880, ia menikah untuk kedua kalinya dengan Teuku Umar, kemanakan ayahnya. Teuku Umar pada saat itu sudah dikenal sebagai pejuang yang selalu dapat merugikan pihak Belanda. Pada tahun 1893 Teuku Umar bekerja sama dengan Belanda sebagai taktik untuk memperoleh senjata dan perlengkapan perang. Tiga tahun kemudian ia berbalik menyerang Belanda namun ia gugur dalam pertempuran di Meulaboh tanggal 11 Pebruari-1899.

Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangannya. Ia dikenal salah satu pejuang yang pantang tunduk dan tidak mau berdamai dengan pihak Belanda. Enam tahun Cut Nyak Dien bergelanya dan pasukan Belanda selalu tidak berhasil menangkapnya.

Waktu kian berjalan pasukan semakin berkurang, bahan makanan sulit didapatkan dan ia semakin tua dan penyakit mulai kambuh seperti mata rabun dan encok. Akhirnya Belanda dapat menangkapnya. Sewaktu penangkapan Cut Nyak Dien sempat mengadakan perlawanan dengan sebuah rencongnya kana tetapi perlawanan itu dapat di atasi oleh Belanda karena kondisi Cut Nyak Dien sudah melemah karena tua dan sakit. Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, di tempat pembuangan itu ia meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1908 dan dimakamkan disana.

Cut Nyak Meutia. Awalnya Cut Meutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Teuku Muhammad atau Teuku Cik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Cik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lhokseumawe. Sebelum meninggal, Teuku Cik Tunong berpesan kepada sahabatnya Pang Nagroe agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Teuku Raja Sabi.

Cut Meutia kemudian menikah dengan Pang Nagroe sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya dibawah pimpinan Teuku Muda Gantoe. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marechausée di Paya Cicem, Cut Meutia dan para wanita

melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nagroe sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada tanggal 26 September 1910.

Cut Meutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910, Cut Meutia bersama pasukannya bentrok dengan Marechausée di Alue Kurieng. Dalam pertempuran itu Cut Nyak Meutia gugur.

Beberapa contoh tersebut menggambarkan posisi, peran dan perjuangan-perjuangan perempuan Aceh yang berkontribusi besar bagi upaya membangun eksistensi, karakter serta teladan bagi Aceh secara umum kemudian. Sekelompok beberapa tokoh yang disarikan dari berbagai sumber sebagaimana tersebut diatas dapat di gambarkan lebih luas lagi dari tabel berikut. Berikut merupakan tabel yang berisikan daftar Perempuan Aceh yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam tata pemerintahan sebelum dan sesudah mulainya perang melawan Belanda pada tahun 1873. Berikut adalah tabel periodeisasi dan posisi perempuan di masa lalu.

| NAMA | POSISI | PERIODE | TEMPAT |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Putri Lindung Bulan | Perdana Menteri | Tahun 1353-1398 | Kesultanan Perlak |
| Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu | Ratu | Tahun 1400-1428 | Kesultanan Samudra Pasai |
| Malahayati | Laksamana | Tahun 1589-1604 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Meurah Ganti | Laksamana | Tahun 1604-1607 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Cut Meurah Inseusen | Laksamana muda | Tahun 1604-1607 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Taj' Al Alam | Ratu | Tahun 1641-1675 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Cut Nyak Keureuto | Kepala Daerah Otonom (Uleebalang) | Tahun 1641-1675 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Cut Nyak Fatimah | Kepala Daerah Otonom (Uleebalang) | Tahun 1641-1675 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Sri Ratu Nurul Alam Nakiatu'ddin Sjah | Ratu | Tahun 1675-1678 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Sultan Inayat Zakiatuddin Sjah | Ratu | Tahun 1678-1688 | Kesultanan Aceh Darussalam |
| Seri Ratu Kamalat Syah | Ratu | Tahun 1688-1699 | Kesultanan Aceh Darussalam |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|
| Pocut Meuligo | Uleebalang, penasehat perang dan jendral di Samalanga | Akhir abad ke-18 (tahun 1857) | Selama awal peperangan melawan Belanda |
| Tengku Fakinah | Jendral dan Ulama, memiliki Dayah | Tahun 1856-1933 | Selama awal peperangan melawan Belanda |
| Cut Nyak Dien | Jendral di Aceh Barat | Wafat 8 november 1908 | Selama awal peperangan melawan Belanda |
| Cut Meutia | Jendral di Aceh Utara | Wafat 25 Oktober 1910 | Selama awal peperangan melawan Belanda |
| Pocut Baren Biheue | Jendral di Aceh Barat | Awal abad ke-19 | Selama awal peperangan melawan Belanda |

Kemungkinan masih banyak lagi sederetan nama-nama perempuan yang duduk pada tampuk-tampuk kekuasaan pada masa lalu, karena tentu saja yang tertera diatas merupakan nama-nama yang tercatat dan terdokumentasi dengan baik.

1.2 Beban Ganda Perempuan

Sebagaimana diurai dalam bagian sebelumnya, berbicara pluralitas dan keterbukaan Aceh, selain membawa kisah-kisah di Aceh pada masa-masa keemasan, sebenarnya turut juga memberi celah potensi konflik kepentingan antar suku dan bangsa dari masa kemasa. Dalam menyikapi hal tersebut, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa bukan saja dominasi laki-laki yang berkontribusi dalam melakukan perlawanan, perempuan-perempuan Aceh juga berkontribusi dalam melakukan hal serupa. Bahkan cukup banyak posisi-posisi strategis politik dan kekuasaan justru dipegang oleh perempuan-perempuan Aceh. Pada bagian ini akan digambarkan sisi lain dari perjuangan dan posisi-posisi strategis perempuan Aceh sebagaimana telah disebutkan. Bagian ini juga akan melihat efek dari proses-proses penguasaan (*baca: konflik*) yang menimbulkan beban berlipat bagi perempuan.

Situasi damai dan sejahtera sesungguhnya adalah keinginan hakiki setiap manusia, termasuk kaum perempuan. Damai dipahami bukan sekedar kondisi bebas dari peperangan dan kekerasan belaka. Lebih luas lagi, perdamaian seharusnya dapat mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi yang seimbang atas hak-hak warga negara antara laki-laki dan perempuan secara proporsional. Proporsional dalam arti memberikan perhatian sesuai dengan kondisi dan beban yang ditanggungnya akibat konflik. Dalam situasi yang tidak damai, beban yang dialami perempuan tentu jauh berbeda dengan yang dialami laki-laki.

Dyah Rahmani (2001) mengatakan bahwa perempuan menanggung beban yang berat dalam situasi konflik. Dia menggambarkan jika laki-laki terpaksa harus lari atau dibunuh dan lain sebagainya, pada saat bersamaan sesungguhnya dia meninggalkan istri dan sejumlah anak. Implikasi atas hal tersebut sesungguhnya memposisikan perempuan mengambil alih tugas kepala rumah tangga. Padahal sebelumnya, kebanyakan masyarakat memahami perempuan hanya untuk mengurus tugas-tugas di dalam rumah tangga atau tugas domestik. Pada posisi tersebut sesungguhnya perempuan sudah berada pada dua peran sekaligus, peran sebagai pencari nafkah, sekaligus pengurus rumah tangga dan pendidik anak. Belum lagi, jika pada saat yang bersamaan perempuan teribat dalam proses perlawanan (perjuangan). Baik itu perjuangan bersenjata, perjuangan menegakan hak yang terlanggar pada diri/keluarganya ataupun perjuangan untuk menegakkan perdamaian itu sendiri.

Bukanlah isapan jempol, fakta-fakta menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban dari konflik yang terjadi di Aceh. Kasus-kasus kekerasan baik fisik dan non-fisik semakin tinggi. Penegakan hukum pada saat kondisi konflik atau perang sesungguhnya pada kondisi lumpuh. Perempuan yang mengalami kasus perkosaan, penyiksaan yang menjerus pada alat reproduksi dan aksi-aksi tak bermoral tidak dapat berbuat banyak dan seandainya pun terungkap hanya menjadi data-data yang belum tentu ditindaklanjuti dari sisi hukum.

Demikian pula perempuan yang menjadi janda akibat perang. Kelompok ini akan menjadi perempuan kepala rumah tangga, mendidik anak dan mencari nafkah buat keluarga. Jikapun perempuan-perempuan berupaya mendorong penegakan hak-hak yang

terlanggar bagi dirinya, secara kultur di Aceh (dan di wilayah lain umumnya), pendapat perempuan cenderung diabaikan karena dianggap tidak mengetahui apa-apa soal peperangan (konflik).

Akibat konflik telah memunculkan suatu kondisi dimana banyak perempuan Aceh terpaksa menjadi orang tua tunggal karena suami mereka telah meninggal, ditangkap, bergabung dengan GAM, hilang atau pergi untuk menghindari kekerasan. Sebagian besar tempat di Aceh terutama di kampung-kampung yang jauh di pedalaman, hanya di huni oleh perempuan, anak-anak dan orang tua. Hal ini memberi dampak yang parah terhadap ekonomi keluarga. Perempuan bekerja tanpa bantuan laki-laki sehingga mereka tidak bisa memperoleh hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini berakibat bagi pendidikan anak-anak mereka. Selain itu juga, tidak adanya perlindungan dari laki-laki di dalam masyarakat. Perempuan harus berjuang sendiri membesarkan anak-anak dan melindungi komunitas

Sebagai upaya perempuan menegakkan hak-haknya, perempuan banyak menghadapi berbagai kendala. Pertama, kendala berasal dari keluarga (internal). Biasanya datang dari suami, dimana terdapat batasan-batasan untuk keluar rumah apalagi menghadiri pertemuan-pertemuan sesama perempuan. Selain itu perempuan juga mengalami hambatan-hambatan eksternal dalam mengekspresikan dirinya. Dalam konteks perang/konflik perempuan diposisikan menempati garis belakang. Keterlibatan perempuan lebih cenderung mengurus keperluan logistik dan obat-obatan. Pada posisi ini perempuan akan susah untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya secara lugas.

1.3 Kekerasan Terhadap Perempuan Semasa Konflik

Tanggal 4 Desember 1976 adalah awal dari konflik berkepanjangan di Aceh dalam konteks ke-Indonesiaan. Dimana ketika itu Aceh merdeka diproklamlirkan oleh Hasan Di Tiro, sebagai suatu gerakan bersenjata di Aceh dengan tujuan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia. Gerakan tersebut oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan disebut sebagai Gerakan Pengacau Liar/Hasan Tiro (GPL/HT). Dan untuk menumpas gerakan itu pemerintah menggelar operasi militer dengan sandi "Operasi Nanggala". Sejak itu hingga tahun 1998 Aceh dalam kondisi perang, berlumuran darah dan jatuh dalam ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kekerasan semakin meningkat dengan pemberlakuan Darurat Militer (DM) pada tanggal 19 Mei 2003. Operasi militer yang digelar dalam rangka menghentikan perlawanan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) ternyata telah menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Sejak operasi militer itu, lebih dari 2000 orang telah terbunuh, 2100 orang telah ditahan, dan ratusan dari mereka telah di adili, tanpa memperoleh proses hukum yang sebenarnya. Berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia selama pemberlakuan Darurat Militer telah menyebabkan penderitaan yang tidak terperikan bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan Aceh. Beberapa informasi kekerasan yang terjadi bagi perempuan sebagaimana yang disarikan dari tulisan Mahmud (dalam artikel "peran dan perempuan Aceh"), diantaranya adalah :

1. Pemaksaan terhadap masyarakat sipil untuk pindah ke kamp-kamp pengungsi yang disediakan militer. Meski strategi ini dimaksudkan militer untuk memutuskan hubungan anggota GAM dengan masyarakat untuk tidak membantu logistik GAM. Para pengungsi terbesar sesungguhnya adalah perempuan, anak-anak dan orang tua. Dalam kondisi tersebut, mereka hidup menderita di kamp-kamp tersebut, karena tidak tersedia fasilitas yang dibutuhkan. Tidak ada air bersih, tidak cukup makanan dan tidak tersedianya obat-obatan, terbengkalainya pendidikan anak-anak mereka, juga tidak adanya jaminan keamanan siang dan malam. Mereka mengalami kekerasan dari militer selama di kamp, dipaksa menjadi buruh untuk membantu kebutuhan militer, seperti memasak, mengambil air, dan membangun tempat perlindungan. Sebagian pengungsi di tangkap dengan tuduhan GAM. Mereka mengalami penyiksaan dan penghilangan paksa. Para gadis dan perempuan kerap menjadi korban pelecehan seksual dan perkosaan. Ketika akhirnya mereka dipaksa pulang kembali, rumah mereka telah di bakar dan dihancurkan, ternak mereka telah dicuri. Sawah dan ladang terbengkalai, karena mereka dilarang mengerjakan sawah dan ladang selama di pengungsian.
2. Perkosaan dan pelecehan seksual. Kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Aceh merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat menonjol dalam perang Aceh, bahkan telah dideteksi sejak masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998. Kekerasan terhadap perempuan dalam daerah konflik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional karena pada hakekatnya perempuan, orang tua dan anak-anak harus dilindungi dalam wilayah perang.

Kekerasan terhadap perempuan dalam wilayah yang dilanda perang adalah senjata yang ampuh untuk menaklukkan lawan, menimbulkan terror dan menghancurkan martabat perempuan. Sebagaimana yang selama ini terjadi di Aceh, kekerasan

terhadap perempuan telah terjadi dalam skala yang luas. Bagaimanapun sulit untuk memperoleh data yang jelas, karena korban lebih banyak menutup kasus yang menimpa diri mereka. Hal ini disebabkan oleh ancaman oleh pelaku maupun stigmatisasi dalam masyarakat. Selain takut dengan ancaman pelaku, korban juga merasa bahwa apa yang telah mereka alami merupakan aib bagi mereka, keluarga dan masyarakat. Mereka memilih diam dan menyimpan sendiri malapetaka ini. Jelasnya, hakekat perang telah berubah. Perang berlangsung di rumah dan masyarakat – **dan pada tubuh perempuan** – perang untuk merampas sumber daya dan atas nama agama dan suku bangsa. Kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk menghancurkan dan mempermalukan perempuan, laki-laki, keluarga, masyarakat, tidak masalah dipihak mana mereka. Perempuan telah menjadi korban terbesar dalam perang – dan mereka juga pemrakarsa terbesar bagi upaya damai.

Perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan Aceh merupakan senjata yang digunakan oleh militer sebagai *shock therapy* dalam upaya mematahkan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Perkosaan dan kekerasan seksual dilakukan terhadap perempuan Aceh terlebih lagi bagi keluarga GAM, yaitu istri, ibu, anak perempuan maupun saudara perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan Aceh menimbulkan trauma fisik dan mental. Beberapa contoh bagaimana perempuan Aceh hidup dibawah kekejaman militer Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Saat TNI/POLRI melakukan operasi militer berupa *sweeping* rutin dari rumah ke rumah dengan alasan mencari anggota GAM. Dalam *sweeping* ini, perempuan Aceh kerap mendapat kekerasan fisik maupun mental. Kekerasan seksual sampai perkosaan juga sering terjadi, bahkan kadang-kadang mereka ada yang diperkosa di hadapan suami, anak-anak maupun keluarga mereka.
- b. Penyisiran (*sweeping*) yang dilakukan setelah adanya kontak senjata dengan anggota GAM. Dalam keadaan marah, aparat menumpahkan kemarahan kepada masyarakat karena gagal menemukan anggota GAM. Masyarakat dikumpulkan dan mendapat perlakuan kasar. Bagi perempuan sering terjadi pelecehan massal maupun perkosaan.
- c. Derita yang lain adalah, bagi perempuan yang kehilangan anggota keluarga yang di tangkap atau diculik. Korban yang ditangkap sering tidak pernah di ketahui keberadaannya walaupun jelas diketahui unit yang menangkap mereka. Hal ini adalah penderitaan yang sangat berat bagi perempuan karena mereka selalu memikirkan keadaan keluarga yang hilang tersebut. Tugas mencari anggota keluarga yang hilang biasanya dilakukan perempuan, berdasarkan pengalaman mereka, kalau laki-laki yang datang mencari, maka laki-laki tersebut juga ikut menghilang. Perempuan datang dari satu pos ke pos yang lain, sehari-hari mencari sampai mereka berhenti karena kehabisan biaya dan terlalu letih.

Berikut beberapa contoh kasus-kasus kekerasan fisik dan pelecehan yang dialami perempuan yang berhasil dikompilasi oleh LBH:

| No. | Initial (Nama samaran) | Umur / Status | Waktu Kejadian | Modus Operandi |
|-----|------------------------|--|----------------|---|
| 1. | As, An, Bc | 24 tahun, Gadis (Kec. Sawang, A. Utara) | 1991 | Ketiga korban diperkosa oleh oknum petugas (kesatuan tidak jelas), setelah diperkosa ketiganya dibaringkan bersusun, lalu ditembak. |
| 2. | Dn | 37 tahun, Ibu rumah tangga (Kec. Sawang, A. Utara) | 1991 | Korban sedang hamil 5 bulan, diperkosa oleh oknum aparat (kesatuan tidak jelas), lalu ditembak. |
| 3. | Sh | 32 tahun, gadis Kec. Bandar dua, Pidie | 17-8-96 | Korban sedang berjualan diwarungnya, sejumlah oknum tentera dari Yonif 126 Ulee Glee, salah satunya Pratu HMS dalam keadaan mabuk mengganggu Sh. Sh yang ketakutan langsung tertatih-tatih pulang (cat. kakinya cacat). HMS mengejar dan mendorong pintu yang sedang di kunci Sh, memperkosa dan mengancam akan menembak kalau tidak melayani dia. Korban hamil, ketika mencari pertanggungjawaban setelah anak tersebut lahir, korban disuruh menandatangani tidak akan menggugat HMS dengan memberi uang Rp.500.000, yang diantar komandannya. Sekarang bayi tersebut sudah berumur 14 bulan. |
| 4. | Sum | Gadis,....thn. Kec. Bandar Dua. Pidie | 1996 | Sum berpacaran dengan Sertu Har (anggota Yonif 126), yang mengaku masih bujangan. Dan berjanji menikahi. Setelah hamil (menurut korban juga dipaksa), dan punya anak laki-laki tidak dinikahi juga. Ketika Sum menyusul ke Pematang Siantar ternyata Har sudah punya istri dan 2 anak. |
| 5.. | Ktj | 45 thn Ibu Rt, Desa Cot Baroh Kec.Glp.Tiga Pidie | Pebruari 98 | Korban ditangkap dan dibawa ke "Rumoh Geudong" oleh Kopassus setelah pulang mengunjungi anaknya di Malaysia. Korban disiksa, ditentangi, disetrom di payudara dan vagina selama 15 hari. April 98 korban kembali dijemput dengan tuduhan menyembunyikan senjata, rumahnya hancur diobrak-abrik tetapi senjata tidak ditemukan. Korban kembali di bawa ke Rumoh gedung dan mendapat siksaan yang sama,lalu di pindahkan ke Rancung dan bulan Juni 98 dilepaskan. Ketika dilepas yang terakhir, korban diminta uang Rp. 500.000,- dengan ancaman, kalau tidak diberikan, |

| | | | | |
|----|----|---|----------|--|
| | | | | maka korban akan dijemput lagi. Terpaksa korban mengumpulkan uang dan memberikannya. |
| 6 | Mm | 45 thn, Ibu Rt Desa Cot Murong, Kec. Tiro Pidie | Maret 98 | Korban di bawa Kopassus ke pos Aron dengan tuduhan "mempeusijuk" senjata, korban ditelanjangi, disiksa, ditendang, payudara dan vaginanya disetrom. Korban meninggal setelah 4 hari. |
| 7 | An | 25 tahun, Ibu Rt, Desa Didoh, Kec Mutiarra, Pidie | Maret 98 | Korban ditahan Kopassus, dibawa ke Aron, ketika diintrogasi ditelanjangi seta disetrom pakai listrik, disiksa selama satu minggu, kemudian baru dilepas. |
| 8 | Nm | 35 thn, Ibu Rt, Desa Rantieng, Kec Ujung Rimba, Pidie | Maret 98 | Korban ditangkap kopassus, ketika diintrogasi, korban disiksa, ditelanjangi dan disetrom di Pos Aron, lalu dibawa lagi ke Pos tiro, ditahan 2 malam serta mengalami penyiksaan serupa. |
| 9 | Hf | 28 thn, Kec Laweung, Pidie | Agust 96 | Korban mengalami pelecehan seksual oleh kepala desa, ketika sedang berada dalam rumahnya sendiri. Dari hasil investigasi banyak yang mengalami pelecehan sampai ketahap pemaksaan melakukan hubungan seksual. Tetapi korban lainnya tidak mau jadi saksi, karena adanya ancaman dari Kepala desa keluarganya (bapak/suami) akan dituduh GPK. Alasan lain, karena sebagian yang mengalami pelecehan sudah mempunyai suami dan menimbulkan persoalan dengan suami. |
| 10 | PP | 45 thn, Dayah Baroeh, Kec Batee, Pidie | 1992 | Sekitar pukul 22.00, sepasukan militer datang (kesatuan tidak jelas), menyuruh 3 desa masyarakat sekitar semuanya berkumpul (tua-muda, laki-laki dan perempuan) di Meunasah. Korban, matanya buta dan tidak datang. Seorang aparat mendatangi korban, mengancam, membentak dan memperkosa korban. Setelah itu korban sakit (fisik) selama seminggu dan mengalami trauma berat, sehingga terus-menerus menangis dan ketakutan, terkadang bingung. Akhirnya keluarga mengungsikannya ke salah satu pulau di Aceh. Korban baru kembali ke desanya dua bulan yang lalu |

Sumber: dokumentasi LBH, aktifis dan NGO Aceh, dari kesaksian para korban, keluarga korban dan saksi mata (tetangga/masyarakat).

1.4 Inong Bale: Salah Satu Bentuk Gerakan Perempuan Aceh

Salah satu bentuk perlawanan perempuan Aceh atas derita yang dihadapinya melalui Inong Bale. Inong Bale menurut bahasa Aceh, sebenarnya bukanlah tentara perempuan. Melainkan perempuan yang telah ditinggal suaminya atau janda. Suaminya itu meninggal dunia, bisa karena ditembak atau mendapat perlakuan keras dari pihak militer atau kepolisian Indonesia. Hal ini yang menyebabkan mereka akhirnya menjanda. Fenomena Inong Bale ini muncul sekitar tahun 1989, saat "Operasi Jaring Merah" atau OJM diberlakukan di Daerah Istimewa Aceh--sebelum otonomi khusus diberikan kepada Aceh--. Operasi ini digelar karena adanya penyerangan-penyerangan secara sporadis terhadap pos-pos polisi atau tentara di beberapa wilayah Aceh.

Dari penyerangan itu, bukan cuma senjata api yang hilang. Nyawa aparat keamanan juga banyak yang ikut melayang. Pelakunya tentu saja aktifis bersenjata yang menginginkan kemerdekaan dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). OJM lebih banyak difokuskan kepada kegiatan intelijen. Penangkapan, kekerasan sampai pembunuhan dilakukan. Dampaknya, tentu saja memunculkan rasa tak simpatik di kalangan masyarakat Aceh. Karena rasa itu, kaum muda dan tua bergabung dengan GAM. Para janda yang suaminya hilang atau meninggal dunia akibat perlakuan aparat, akhirnya ikut pula bergabung. Dendam kesumatlah yang memotivasi mereka.

OJM justru malah memperbesar jumlah mereka. Aksi penyerangan dan sabotase terhadap fasilitas militer dan kepolisian, justru makin intensif. Dinilai kurang cocok, akhirnya OJM dihentikan. Namun, operasi ala militer itu cuma berhenti tak lama. Era orde baru pun berganti menjadi era reformasi. Pada 1999, di Aceh lagi-lagi diberlakukan operasi militer dan mendapat cap baru menjadi Daerah Operasi Militer (DOM).

DOM ternyata setali tiga uang. Tak jauh berbeda dengan OJM. Aksi kekerasan yang terjadi pun tak kalah serunya. Di sana-sani meninggalkan kekerasan dan menghilangkan nyawa. Di sana-sini pula menimbulkan dendam. Sebutan Inong Bale yang tadinya untuk janda, kini beralih. Kaum perempuan muda Aceh yang simpatik terhadap penderitaan rakyatnya sendiri, akhirnya ikut bergabung. Mereka memberikan segala kekuatan untuk mendukung perjuangan yang mereka yakini itu. Tak jarang, bergabung karena pelecehan atau diperkosa aparat.

Julukan Inong Bale sebagai tentara perempuan itu diberikan Panglima GAM Tengku Abdullah Syafei. Tetapi nama itu sempat diganti menjadi Laskariyah dengan arti yang sama sebagai tentara wanita GAM. Nama itu diberikan Panglima GAM Wilayah Jeunib yakni Tengku Darwis Jeunib. Sebutan itu berubah dan kembali ke julukan seperti sebelumnya. Dari Inong Bale menjadi Laskariyah dan kembali jadi Inong Bale.

Jumlah mereka tak ada yang pasti. Mediag Tengku Abdullah Syafei sempat mengklaim jumlah Inong Bale sekitar 2.000 orang. Klaim itu tak jauh berbeda dengan yang dikatakan juru bicara GAM Tengku Sofyan Daud. Namun, sumber Satgas Intelijen Komando Operasi (Koops) TNI di Lhokseumawe, Aceh Utara, menyebutnya sekitar 200-300 orang. Keberadaan mereka tersebar seantero Tanah Rencong.

Keberadaan mereka memang tak perlu diragukan. Dalam penyergapan yang menewaskan tujuh anggota marinir di perbukitan daerah Matang Kumbang, Jeumpa, Bireuen, ditemukan mayat perempuan. Senapan laras panjang juga ditemukan di dekat dirinya. Baik pihak Koops TNI dan GAM, sama-sama mengklaim mayat wanita itu adalah tentara wanita GAM.

Potret Seorang Pejuang Inong Bale

Kisah berikut merupakan salah satu penuturan yang disampaikan oleh salah seorang mantan Inong Bale. Kisah ini memberikan gambaran bagaimana latar belakang dan apa saja hal-hal yang dilakukan semasa beraktivitas dalam Inong Bale. Sebut saja namanya Adek. Perempuan yang dilahirkan pada tanggal 3 oktober 1984 ini dilahirkan di Blang Bintang.

Pada tahun 1999 beliau sudah senang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan mengikuti beberapa kegiatan –kegiatan yang dilakukan GAM. Pada usianya yang ke-15, beliau merasa terketuk hatinya untuk ikut bergabung bersama GAM. Dalam pikirannya sebagai anak aceh, ada ketidakadilan yang diberikan oleh RI. Beberapa ketidakadilan yang dipahaminya diantaranya menyangkut penerimaan pegawai negeri yang lulus, dominasi lebih banyak dari orang jawa maupun orang yang bukan Aceh. Selain itu, beliau juga merasakan bahwa tentara yang berasal dari aceh, ketika sudah sampai pada letnan, kerap telah pensiun (baca: dipensiunkan), padahal waktu dinas belum berakhir. Sementara tentara yang berasal dari daerah lain tidak demikian. Demikian pula masalah ekonomi, terjadinya gap perekonomian aceh dengan wilayah lainnya, padahal aceh telah banyak menyumbangkan untuk indonesia ini. Seperti pesawat tempur pertama (saat ini menjadi tugu di Lambaro) ataupun emas di monas, dimana merupakan emas kepunyaan Aceh. Dugaan-dugaan yang dirasakan, tentara yang berasal diluar Aceh takut ketika anak-anak aceh sudah mulai memiliki kekuasaan dan kekuatan. Hal-hal sebagaimana tersebut diataslah yang mendorong Adek dan teman-teman inong bale lainnya tertarik untuk bergabung dengan GAM.

Pada tahun 2000, ketika MoU COHA bergulir, Adek justru mendaftarkan diri menjadi Inong bale. Padahal, jika dilihat dari latar belakang keluarganya, beliau berasal dari keluarga yang mayoritas bekerja di pemerintahan, seperti TNI, kantor gubernur, dll. Bahkan dalam keluarganya, dia merupakan putri satu-satunya. Sehingga sangat logis kiranya, jika keluarga tidak mengizinkan beliau, ketika Adek meminta ijin bergabung dalam GAM. Tapi adek tetap kukuh dengan pendiriannya untuk ikut bergabung dalam kelompok Inong Bale.

Pada saat beliau berangkat untuk pendidikan di hutan-hutan Pidie, ibunya sempat pingsan, namun demikian beliau tidak menghiraukan dan berkata” Ya Allah, seandainya ini baik bagiku dan bagi Aceh, ringankanlah langkah ku” . Tanpa berat hati dan terpaksa adek pergi untuk menuntut pendidikan militernya, hati kecilnyapun pernah bersumpah ” saya rela mengorbankan jiwa raga dan harta saya demi Aceh ini ”

Adek mengikuti pelatihan militer selama 4 bulan, dimana 2 (dua) bulan setengah mengikuti pelatihan militer dan 1 bulan setengah praktek untuk turun kelapangan dan berperang. Kegiatan adek dan teman inong bale lainnya, ba'da sholat subuh sudah berlari

10 km naik turun gunung dilanjutkan latihan-latihan berat lainnya hingga berhenti sampai jam 6. Aktivitas malam diisi dengan mengaji Al-Quran, berdzikir, siraman rohani, serta menggali pengetahuan tentang aceh. Dalam penuturannya juga dikatakan bahwa di dalam Inong Bale, bukan hanya orang aceh saja yang ikut bergabung di dalamnya, namun juga terdapat dari suku lain, seperti suku Batak, Padang dan lain sebagainya.

Dalam proses pendidikan, Adek merasa Abdullah Syafi'i merupakan panglima GAM dan guru di pendidikan militer GAM yang luar biasa. Abdullah sangat menyayangi murid-muridnya termasuk adek. Abdullah pernah berkata dengan adek " Nak siang malam saya minta dengan tuhan mendingan saya sahid". " kenapa teungku bilang begitu" tanya Adek. "Karena saya takut nanti saya tidak adil", begitu tutur Abdulah perbincangannya dengan Adek di tahun 2003 .

Setelah 4 bulan pendidikan militer di hutan Pidie, waktunya turun ke Banda Aceh, adek dan teman Inong Bale yang lain tidak langsung pulang ke rumah, namun pergi ke asrama dulu guna menghilangkan jejak. Selang beberapa saat baru kemudian pulang ke rumahnya. Dari semua aktivitasnya selaku Inong Bale, tidak ada seorang tetangga pun yang tahu bahwa adek merupakan salah satu pasukan Inong Bale. Ibu dan keluarganya hanya mengatakan,"Adek sekolah di Jakarta ikut kakaknya" demikian jawaban yang kerap disampaikan ibunya, ketika tetangga bertanya tentang Adek.

Sekembalinya dari rumah, beliau dimandatkan menjadi ketua atau Mualim Aceh Besar yang mengajarkan 1500 orang. Seluruh calon pasukan tersebut akan dididik menjadi pasukan Inong Bale. Tidak ada yang menyangka anak usia 17 tahun telah menjadi mualim. Ini dikarenakan sifat adek yang kuat/keras dan berani melawan segalanya. Seperti sumpahnya pada saat masuk menjadi pasukan inong bale. Adek bukan hanya menjadi mualim tapi dia juga ikut dalam beberapa peperangan. Tidak lama kemudian adek menikah dengan seorang anggota GAM. Setelah menikah dia tidak diam saja sebagai seorang ibu rumah tangga, dia tetep ikut berperang, dan dia pernah keguguran karena berlari dikejar dengan TNI, beberapa peperangan yang pernah diikutinya di antaranya di kawasan Selawah, Siron atau daerah-daerah utara lainnya.

Pada tahun 2003 Adek mulai *off* karena dia telah dikaruniai seorang anak, beliau hanya mengikuti kegiatan sosial walau sesekali kerap ikut berperang juga. Saat ini, Adek aktif dalam partai GAM (partai Aceh *-red*). Sangat sering waktunya dihabiskan untuk memberikan tenaga dan fikiran-fikirannya di sana, walaupun seringnya tidak memperoleh apa-apa. Hal itu tidak mengendurkan niatnya untuk tetap eksis dan berjuang.

Walau situasi saat ini telah damai, dan Adek telah bergabung dalam partai polirik lokal, namun dalam hati nurani yang paling dalam, sesungguhnya beliau tetap menginginkan kemerdekaan bagi Aceh.

Uraian sebagaimana yang dituturkan aktifis Inong Bale tersebut di atas, menggambarkan bahwa seorang perempuan yang sangat teguh kepada pendiriannya. Upaya untuk mendorong adanya ketidakadilan yang terjadi, dijawab dengan keterlibatan dalam menciptakan konflik bersenjata, walau dalam keadaan masih hamil sekali pun. Keteguhan

seorang aktifis perempuan juga bisa terjadi perubahan sesuai dengan konteksnya. Pada masa konteks damai, aktifis perempuan ini menjadi salah satu aktifis yang terus melakukan perjuangan. Perjuangan untuk konflik bersenjata pada masa konflik mulai berubah menjadi perjuangan-perjuangan politik, juga terlibat didalamnya, melalui kendaraan politik, partai lokal.

1.5 Kisah-Kisah Perjuangan Perempuan Aceh

Kisah-kisah perlawanan perempuan Aceh, bukan saja dialami bagi perempuan korban saat terjadi akibat konflik. Namun juga terjadi bagi para perempuan (istri pejuang) yang ditinggal suaminya berjuang, para perempuan yang memperjuangkan keadilan hukum ketika masa damai maupun perjuangan perempuan pada masa damai. Berikut beberapa kisah nyata lain sebagai upaya perjuangan perempuan Aceh.

Perempuan Pemimpin Perang dan Beban Gandanya

Salah satu kisah berikut merupakan penuturan seorang istri mantan GAM yang harus mengalami perjalanan hidup mulai dari suaminya masuk GAM hingga berjuang hidup setelah suaminya meninggal dalam perjuangannya.

Nurbaiti (48 tahun), ibu asal Langsa menuturkan bagaimana perjuangan hidup yang dijalannya dan keluarga sejak masa konflik hingga bahkan paska tsunami. Kisah ini diawali ketika suaminya masuk dalam GAM pada tahun 2000. Almarhum Zakaria Yahya, suami tercinta yang lahir 2 Mei 1965 merupakan lelaki sederhana dengan kesehariannya merupakan pedagang asongan di Ulee Kareng. Pada tahun 2000, Zakaria bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanpa diketahui Nurbaiti (istrinya). Loyalitas Zakaria ditunjukkan dengan berbagai pengorbanan yang dia berikan, termasuk kemudian meninggalkan usahanya. Dalam struktur GAM Zakaria memiliki peran sebagai Juru bicara di wilayah Aceh Besar. Atas perannya tersebut, Zakaria termasuk salah satu orang yang dicari TNI pada saat itu.

Nurbaiti pada akhirnya mengetahui aktivitas suaminya merupakan anggota GAM justru dari tetangganya. Hal itu diketahui ketika suatu hari pada tahun 2000, rumahnya digerebek, diperiksa serta dibakar pada bagian depannya oleh TNI saat mencari suaminya. Perasaan *shock* demikian melanda Nurbaiti. Namun kemudian, dengan rasa tegar, perlahan Nurbaiti mampu menghilangkan perasaan kuatir dan takut tersebut, hingga pada akhirnya sang istri mengikhlaskan suaminya menjadi Anggota GAM.

Belum lepas sepenuhnya perasaan *shock* dan kuatir atas keselamatan suaminya yang terus terancam. Pada Sabtu, pukul 14.00 tanggal 11 Mei 2002, TNI kembali datang kerumahnya yang membawa kabar suaminya telah meninggal. TNI datang kerumahnya setelah sebelumnya menembak rusuk suami Nurbaiti hingga meninggal di daerah Cot Cot Kecamatan Ulee Kareng. Keberadaan rumah Nurbaiti diketahui TNI dari dokumen, dan beberapa barang lain suaminya yang disita TNI setelah proses penembakan tersebut.

Rasa pilu dan sedih mendalam dirasakan Nurbaiti, perasaan tersebut semakin berat mengingat dirinya baru 14 hari melahirkan anak yang kelimanya dimana si kecil sama sekali belum pernah dilihat ayahnya yang selama tiga bulan terakhir tidak pulang ke rumah. Meninggalnya sang suami hanya meninggalkan sebuah rumah yang dihuninya. Tanpa ada harta lain untuk usaha. Keadaan yang sulit, tanpa bisa bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, mendorong Nurbaiti untuk terpaksa menumpang hidup kepada kakaknya.

Setelah beberapa bulan paska persalinan, Nurbaiti mulai kuat bekerja untuk membiayai hidup 5 anaknya. Dia berusaha dan melakukan apapun agar anak-anaknya dapat hidup

dengan baik. Dari pekerjaan-pekerjaan sebagai tukang cuci dan beternak ayam dia lakukan, agar kelima anaknya bisa bertahan hidup. Dengan usahanya yang sedemikian ulet, Nurbaiti tetap bisa menyekolahkan ke 5 anaknya hingga saat ini.

Pada masa perdamaian, awal tahun 2008, Nurbaiti mendapatkan bantuan dari Sambrino, sebuah yayasan yang dibentuk dan dikelola oleh Ibu Gubernur. Bantuan yang diberikan berupa sebuah warung kecil di depan rumahnya. Bangunan tersebut jika dirupiahkan sebesar 7 juta rupiah. Bantuan ini dirasakan sangat berarti dan sangat membantu dirinya dan keluarga. Berbekal bantuan tersebut dengan ulet Nurbaiti mengelola usaha sebaik-baiknya. Dari hasil usaha tersebut, paling tidak Nurbaiti dapat memperoleh pendapatan kotor dalam satu bulan, sekitar 1 Juta rupiah. Pendapatan ini sungguh sangat membantu ekonomi rumah tangganya dan berupaya membiayai sekolah ke-5 anak-anaknya, apalagi paska tsunami biaya hidup semakin hari semakin terasa berat di Aceh.

Fakta cerita yang dituturkan Nurbaiti sebagaimana diurai diatas, menunjukkan bagaimana ketegaran dan perjuangan hidup seorang perempuan Aceh dalam masa-masa konflik tahun 2000, hingga masa damai tahun 2008 terus dilakukan dengan tantangan yang berbeda. Perjuangan dari mengatasi *shock*, trauma serta menjadi kepala rumah tangga yang membiayai hidup anak-anaknya dilakukan dengan tegar dan teguh padamasa konflik. Demikian pula paska tsunami dan masa damai. Kondisi harga-harga yang tinggi di Aceh serta kebutuhan 5 anaknya yang semakin banyak tetap saja memaksa Nurbaiti untuk tetap berjuang, berjuang untuk menghidupi keluarganya.

Penegakan Keadilan Saat Damai Bersemi

Berbeda dengan Nurbaiti yang suaminya meninggal masa konflik dan terus berjuang sampai saat ini untuk keluarganya. Asnaini (35) memiliki kisah yang berbeda.² Ibu dua anak ini lahir di Bireuen tanggal 17 Desember 1970. Dia merupakan istri Tgk Ismuhadi. Seorang Narapidana Politik (Napol) GAM yang masih ditahan di LP Cipinang. Suaminya, dituduh terlibat dalam peledakan Bursa Efek Jakarta (BEJ), 6 tahun yang lalu. Hukumannya pun tak tanggung-tanggung, diganjar hukuman seumur hidup.

Kasus peledakan BEJ menggiringnya ke dalam penjara. MoU Helsinki, antara pemerintah RI dan GAM memberikan harapan untuknya menghirup kembali udara bebas. Dalam MoU disepakati point pemberian amnesti untuk anggota GAM yang ditahan maupun masyarakat Aceh yang tersangkut konflik Aceh.

“Kami sebagai keluarganya mengharapkan Teungku bisa cepat dibebaskan”, ujarnya ketika diwawancarai. Keinginan isteri tokoh masyarakat Aceh di Pulau Jawa ini sangat beralasan. Pasalnya, pembebasan tahanan Tapol/Napol GAM sudah disepakati antara RI dan GAM dalam MoU Helsinki. “Jika anggota GAM lain dibebaskan, kenapa suami saya dan ayah dari anak saya belum juga dibebaskan?” dengan ekspresi penuh tanya. Asnaini mengaku, suaminya dari dulu berbuat untuk kepentingan GAM. Dalam perjuangannya, bahkan keluarga sering ditinggalkan. Anak-anak kami juga terlantar.

Ketika masa damai bersemi di Aceh, nasib juga belum berubah. Suaminya masih dalam tahanan, sementara teman-temannya sudah dibebaskan. “Siapa yang harus bertanggung

² Disadur dari SIRA on line

jawab atas nasib anak-anak kami?', Asnani mengaku sangat sedih, dia membayangkan jika suaminya harus menjalani hukuman sampai 35 tahun, berarti saat suaminya keluar nanti, dia sudah sangat tua. "Bagaimana saya harus menceritakan sejarah yang benar tentang ayahnya?" Mereka akan bertanya, kenapa ayahnya tidak dibebaskan seperti anggota GAM yang lain, apa bedanya antara ayahnya dengan anggota GAM lainnya. Ibu dua anak ini tak mampu menjawab.

Kami selaku keluarga menyesalkan pernyataan pimpinan GAM 14 Agustus 2006, tentang penghapusan amnesty bagi anggota GAM seperti Tgk Ismuhadi dan beberapa temantemannya.ujarnya, dengan nada kesal. Kenapa Meuntroe mencoret 16 nama orang GAM dari jatah orang yang menerima amnesty, dan menyatakan mereka bukan sebagai anggota GAM? tanya isteri Ismuhadi tentang pencoretan nama suaminya dari list anggota GAM yang dibebaskan beberapa waktu lalu. Meski harus menempuh berbagai cara, Asnani mengaku sudah siap memperjuangkan keadilan untuk suaminya. Asnani, mungkin akan mengikuti jejak Suciwati, Isteri almarhum Munir, yang memperjuangkan keadilan untuk suaminya yang diracun.

Saya akan menempuh berbagai cara untuk membebaskan suami saya, dan juga para tahanan politik GAM lainnya yang belum juga dibebaskan. Dalam waktu dekat, Asnani yang didampingi teman suaminya, T Iskandar mengaku akan melakukan berbagai cara untuk membebaskan suaminya. Langkah pertama adalah meminta tanda-tangan semua Panglima Wilayah GAM yang menyatakan Tgk Ismuhadi dan rekan-rekannya sebagai orang GAM. Selain itu, tambahnya, dengan bantuan para keluarga GAM yang lain, dia mengaku akan melakukan aksi seperti penyebaran 100 spanduk, poster dan juga doa keprihatinan. Asnani, tetap yakin kalau suaminya akan dibebaskan. Tapi kapan? Dia tak bisa menyebutkannya. Anak-anak, sebutnya, sering bertanya kapan ayahnya pulang, dan kenapa Ayahnya ditahan di LP Cipinang. Di Rumah, mereka sering bertanya kenapa Ayahnya ada di LP Cipinang?.

Kisah Asnani ini menggambarkan bagaimana perjuangan seorang istri dari pejuang GAM, terus mendukung suami selama konflik dan juga masa damai. Perjuangan masa konflik, lebih mengupayakan keluarganya tetap aman dan sejahtera, sementara pada masa damai, perjuangan-perjuangan terus akan dilakukan untuk menegakan keadilan. Keadilan hokum yang dirasa merugikannya pada masa damai tumbuh di Aceh.

Beberapa kisah nyata sebagaimana diesplorasi sebelumnya, menggambarkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan perempuan-perempuan Aceh selama masa konflik. Ada yang trurut bergabung melakukan perlawanan (melalui Inong Bale), ada yang terus menerus mendukung dan membela suami hingga pada masa damai serta upaya perempuan yang berjuang untuk keutuhan rumah tangganya.

Peran Membebaskan Orang yang Tertangkap dan Hilang

Biasanya bagi perempuan yang tidak mempunyai permasalahan atau kendala baik internal maupun eksternal sangat luwes dalam memainkan perannya dalam konflik. Meski ini sebenarnya juga menjadi beban tersendiri bagi perempuan. Di internal mempunyai tugas memasak, mengurus keperluan keluarga dan dalam masyarakat membebaskan orang yang tertangkap. Hal ini dialami oleh Ruqaiyah perempuan asal

Kampung Cot Keueng Kota Baro Aceh Besar, sehari-hari menjadi bekerja sebagai relawan KONTRAS ACEH. Lahir pada 25 Juni 1972.

Dia telah aktif dalam kerja kemanusiaan ini sejak tahun 2000. Apa yang dilakukannya semata-mata ingin membantu orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan bantuan. Dilakukannya pekerjaan membebaskan orang-orang yang tertahan ini di sela-sela kesibukannya bekerja di sebuah lembaga audit keuangan dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Halangan dari keluarga cukup besar tetapi sang suami mendukung upaya-upaya yang dilakukannya meski nyawa resikonya.

Keberadaannya dalam situasi konflik sangat netral, tidak berada pada pihak GAM maupun pemerintah. Posisi ini dirasakan sangat menguntungkan, dimana dia dengan lebih mudah dan leluasa membantu membebaskan orang-orang di kampungnya yang ditahan dan juga yang jenazah orang-orang hilang akibat bentrokan senjata.

Kalau saja dia tahu perdamaian itu akan datang menurutnya dia akan mencatat semua kejadian-kejadian itu. Pahit getir berhadapan dengan berbagai pihak termasuk alat tentara telah dialaminya ketika berusaha membebaskan orang-orang yang dicituk tanpa alasan atau sengaja ditangkap karena alasan tertentu. Semuanya masih terekam dengan cukup baik. Dia iba melihat orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari kontak senjata. Terbunuh, diculik atau disiksa seolah-olah menjadi hal biasa yang mudah dilakukan. Mereka tidak dapat membela dirinya, bahkan membela orang lain pun malah menjadi korban. Berangkat dari rasa iba tersebut dirinya membulatkan tekad untuk menolong korban-korban tersebut. Bagi korban yang terbunuh, mayatnya dicari dan diketemukan. Pada saat itu dia menjalin kontak dengan PMI Aceh untuk mengabarkan kalau-kalau ada mayat yang dicari-cari oleh keluarganya dibawa ke kantor PMI. Rupanya, berkat kerjasama dan relasi yang baik dengan pihak PMI, beberapa mayat yang dicari diketemukan dan dikembalikan kepada keluarganya.

Saat ini dia bekerja sebagai Koordinator Volunter untuk Region Aceh Besar di Kontras Aceh. Semenjak situasi damai dia bekerja pada 8 komunitas yang berada di Kota Baru, Montasik, Indrapuri, Kota Cot Gli, Selimum, Lhok Nga, Lembah Seulawah, Darul Kamal dan Darul Imarah.

Bagian 2

Gerakan Damai Perempuan Aceh

Kurang lebih 30-an tahun Aceh mengalami situasi penuh kekerasan dan letusan senjata, untuk pertama kalinya pada tahun 2000 perempuan Aceh menyuarakan damai di Aceh. Ketika itu "damai" menjadi kata yang sangat mewah untuk disebut bahkan dipergunjingkan karena harus ditebus dengan pengorbanan raga, jiwa dan perasaan. Perempuan Aceh melalui Duek Pakat Inong Aceh pada tahun itu menyepakati akan mengawal perdamaian Aceh hingga terwujud dan meminta partisipasi perempuan dalam kancah politik di Aceh dengan kuota 30%. Setelah kesepakatan dalam DPIA, perempuan Aceh secara konsisten mengikuti langkah demi langkah proses perdamaian. Pada Jeda Kemanusiaan besar andil perempuan dalam meja perundingan, dilanjutkan dengan dialog dalam damai, CoHA hingga pada puncaknya MoU Helsinki yang menunjukkan besarnya harapan perempuan Aceh akan perdamaian langgeng di Aceh. Namun sayangnya kiprah perempuan sebagai perintis perdamaian jarang dibicarakan setelah terjadinya perdamaian di Aceh.

Unifem Asia Timur dan Asia Tenggara (2007) mencatat bahwa bagi perempuan pada masa konflik perdamaian bermakna suatu kebebasan. Kebebasan bertani, berbisnis, bepergian dan berkarya. Perempuan paling menderita akibat konflik. Sayangnya, perempuan Aceh pada umumnya pada negosiasi yang membawa pada penandatanganan perjanjian damai tidak menjadi pertimbangan. Pada masa-masa GAM menuntut kemerdekaan, banyak perempuan bertugas di garis depan, sementara yang lain ikut berkampanye ataupun mempersiapkan logistik dan obat-obatan untuk mendukung. Sayang sekali, tidak ada penyebutan klausul perempuan dalam kesepakatan damai itu. Bahkan kompensasi yang dijanjikan untuk 3000 mantan pasukan GAM, dua ribu orang dibebaskan dari tahanan politik, dan 25 ribu orang masyarakat sipil terkena dampak konflik, tidak ada bantuan ditujukan secara khusus kepada para mantan pejuang perempuan baik pemerintah Indonesia maupun GAM.

Anggapan yang muncul kemudian adalah "konflik identik dengan laki-laki" dan "konflik seakan-akan hanya laki-laki yang dapat menyelesaikannya". Sehingga dalam setiap tahapan penyelesaian konflik di Aceh kepentingan laki-laki selalu diutamakan daripada perempuan. Padahal bila kita ingat-ingat, kala perempuan Aceh meneriakkan damai pada Februari 2000, suara perempuan seolah-olah seperti alunan musik yang mendayu-dayu di tengah-tengah mayoritas pendukung referendum. Namun pada kenyataannya suara tersebut bukan sebuah alunan musik tetapi bola salju yang semakin lama semakin membesar dan keinginan berdamai telah menjadi keinginan bersama di Aceh.

Diperkuat lagi oleh Adriana Venny (2003), dimana ia menyampaikan bahwa beberapa feminis beranggapan kalau konflik dan perang hanya ada dalam benak laki-laki. Ini terjadi karena ia sejak kecil ditumbuhkan sikap agresif. Anak laki-laki disosialisasikan untuk lekat dengan kekerasan, lewat permainan pistol-pistol, perang-perangan, dan sebagainya. Sementara perempuan yang kesehariannya lebih dekat dengan konsep alam serta mengasuh anak, dalam dirinya tumbuh konsep "memelihara".

Sementara laki-laki dalam kehidupan sosial-budaya terus-menerus dikonstruksi pada sesuatu yang bersifat kekerasan, hingga kemudian berkembang menjadi sifat "perusak" lawan dari 'memelihara'. Berbagai konflik seperti konflik antar etnis, agama, peperangan dan militerisme lalu dipahami sebagai wilayah 'kelelakian' dengan pemahaman yang salah kaprah bahwa orang lain adalah lemah (anak dan perempuan). Segala jenis perusakan bahkan terhadap sisi kemanusiaan, disahihkan. Termasuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang menyebabkan banyak perempuan mengalami trauma akibat perang.

Sifat 'kelelakian' yang menjangkit di mana-mana lalu diidentikkan dengan sifat agresif, menguasai, dan menindas pihak lain. Sifat 'kelelakian' tidak hanya melekat pada laki-laki tetapi kadang-kadang sifat ini juga ada dalam diri perempuan. Dorongan yang muncul dari sifat 'kelelakian' ini sikap ingin menang sendiri (ego) dan selalu berhitung agar ada pihak yang menang dan yang kalah. Sementara pihak yang menjadi korban dianggap bisa saja diabaikan. Tentunya akan sulit mencapai perdamaian dalam suatu masyarakat yang punya pola pikir semacam ini.

Pola pikir masyarakat di Aceh, Perang dan perdamaian dalam catatan sejarah di Aceh bukanlah urusan perempuan. Perempuan dianggap tidak perlu berpartisipasi dalam pembahasan dan pembuatan keputusan terkait dengan politik dan masyarakat. Padahal penerima beban yang berat akibat konflik adalah perempuan. Oleh karena itu, peminggiran perempuan dari pembahasan post-konflik atau masa reintegrasi tidaklah menjadi keprihatinan serius dari para pengambil kebijakan. Lembaga yang memandatkan penerapan kesepakatan damai 2005 tidaklah menyiratkan pentingnya mengenalkan hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Hanya beberapa aktifis perempuan dari beberapa LSM yang bisa ikut berpartisipasi dalam pembahasan perjanjian damai.

Pengalaman yang terjadi pada negara-negara yang mengalami konflik dan penyelesaian damai menunjukkan bahwa perempuanlah yang mempunyai andil yang besar dalam terciptanya kondisi damai. Pada phase dimana upaya perdamaian belum terwujud perempuan selalu menjadi aktor utama yang mendorong perdamaian terjadi. Upaya ini dipilih dengan resiko ketidaknyamanan dan kehilangan nyawa. Perempuan berada pada garis depan mendorong perdamaian dan melakukan peran negosiasi di antara pihak bertikai.

Dalam siklus perdamaian dikenal tiga fase: peace making, peace keeping dan peace building. Dalam ketiga fase tersebut perempuan selalu mengambil peran-peran strategis. Pada fase peace making, perempuan berperan sebagai negosiator damai, dia juga bisa berperan sebagai pembebas tawanan dan juga peran dapur umum dan kesehatan. Namun demikian terdapat satu kelompok perempuan yang memperjuangkan perdamaian diawali dengan membangun semangat bersama, membuat komitmen dan memperkuat konsolidasi. Gerakan perempuan inilah yang kemudian membuat noktah sejarah kesuksesan gerakan perempuan dimana perempuan mampu menunjukkan posisinya tidak lagi pada peran-peran dapur, sumur dan kasur. Perempuan berkeinginan untuk juga dapat terlibat dalam peran-peran strategis mengisi tata pemerintahan dan berpolitik.

2.1 Perjuangan Perempuan Masa DOM

Masa DOM merupakan masa mencekam bagi Aceh karena ditetapkannya Aceh sebagai wilayah konflik. Di samping itu pada masa inilah terjadi penyempitan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam urusan tata pemerintahan, misalnya perempuan tidak dilibatkan dalam proses penentuan penetapan status bagi Aceh. Seorang aktivis bagi perdamaian menuturkan bahwa DOM adalah operasi militer yang dilakukan pemerintah terhadap Aceh. Terdapat tiga wilayah yang paling terasa dampak penerapan DOM diantaranya Pidie, Aceh Utara dan Aceh timur. Pada masa DOM, masyarakat di Aceh tidak dapat bahkan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bersifat politis baik bagi perempuan maupun laki-laki. Sementara di Banda Aceh kala itu justru menjadi daerah yang aman dan tidak terjadi apa-apa atau dapat dikatakan konflik kurang dirasakan. Situasi agak berbeda ketika melakukan bepergian ke Medan lewat jalan darat. Terasa suasana DOM, dimana-mana banyak pemeriksaan di pos-pos militer. Operasi militer selalu tertutup atas nama keamanan. Dunia luar tidak tahu, seolah-olah di Aceh selama terdapat pasukan militer justru menjadi aman. Setelah DOM dicabut, ternyata belakangan diketahui bahwa ada penemuan kampung janda³, kemudian ada kuburan masal dan lainnya. Bahkan kisah-kisah pungli dan perampasan harta benda masyarakat dan juga ternak mulai terungkap belakangan.

Salah seorang aktivis gerakan menuturkan bahwa operasi itu kejam dan tidak manusiawi. Dipertanyakan pula mengapa harus menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer. DOM berdampak sangat parah merusak sendi-sendi kehidupan dan tata nilai yang terbangun selama ini di Aceh. Aceh yang selama ini terbuka dan pluralis dengan hadirnya DOM justru bertolak belakang. Aceh menjadi wilayah yang tertutup dan semangat menonjolkan identitas semakin tinggi. Karena situasi operasi militer maka tentu saja kegiatan sweeping dan aksi-aksi penggerebekan serta penculikan kerap kali dilakukan oleh kedua pihak berkonflik. Tentu saja dampak seperti ini akan sangat dialami oleh perempuan Aceh. Sewaktu-waktu para istri akan kehilangan suami, atau perempuan sendiri menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan seksual seperti data-data yang disampaikan di atas. Kalau sebelumnya yang dikatakan GAM itu hanya sedikit dan di tiga wilayah itu, dengan diterapkannya DOM semangat perlawanan semakin meluas pada beberapa wilayah lainnya. Dampak dari DOM justru mendorong GAM lebih mudah diterima oleh seluruh rakyat Aceh.

Selama masa DOM, masyarakat berada dalam keadaan yang sangat sulit, dimana segala hal menjadi terbelenggu. DOM justru lebih memperparah kondisi Aceh. Masyarakat umumnya merasa segala sesuatunya terbatas dalam beraktifitas, berprofesi, dalam memberikan pendapat. Merasa dikekang. Ada yang mengatakan bahwa jika orang Aceh akan keluar rumah apakah bepergian ke ladang untuk menggarap sawah atau pergi kemanapun, pesan yang selalu ditinggalkan di rumah adalah kalau tidak pulang tidak perlu dicari karena kemungkinan sudah tewas atau ditangkap.

³ Tercatat dalam blog yang ditulis Al-Chaidar (2008) bahwa jumlah janda pasca DOM semakin bertambah dan ditemukan bahwa jumlah janda pada setiap kecamatan merata. Peringkat enam teratas ditempati berturut-turut Kecamatan Mutiara, Glumpang Tiga, Bandar Baru, Meuredu, Bandar Dua, dan Kecamatan Pidie. Padahal, enam kecamatan ini tidak semua masuk enam teratas dari segi jumlah penduduk.

Aktivitas sporadis sulit sekali dilakukan oleh kelompok perempuan. Operasi militer yang dilangsungkan sejak tahun 1989 sampai 1998 membuat kaum perempuan tidak bisa bebas berbicara, namun tuntutan reformasi memberi angin segar bagi kondisi Aceh. Pada akhir Juli 1998 sebelum DOM dicabut, para aktifis perempuan di Aceh merambah ke daerah mulai dari Pidie sampai ke Aceh Timur untuk mendata korban DOM. Aktifis dan kelompok perempuan menghimbau kepada mahasiswa agar menjadi sukarelawan untuk pendataan ini. Kegiatan tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal YP-HAM. Setelahnya pada tanggal 7 Agustus 1998, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto datang ke Lhokseumawe mencabut DOM. Menurut beberapa pandangan aktivis perempuan bahwa dicabutnya DOM merupakan buah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan perempuan.

Pada saat itu masih ada semacam ketakutan dan ketidaknyamanan sangat berat yang dialami rakyat Aceh. Mulai saat itu perempuan sebenarnya sudah bergerak. Cuma pada saat DOM gerakan perempuan sangat terbatas. Gerakan ini terus menerus aktif dalam masyarakat untuk menyuarkan hak-hak perempuan dan pentingnya perempuan berbicara. Pada situasi ini dipandang sebagai cikal bakal kebangkitan gerakan perempuan. Pada lapis berikutnya, muncul lagi sederetan aktifis perempuan muda yang berjuang untuk kebaikan dan perdamaian Aceh.

Gerakan perempuan saat itu ingin agar perempuan bangkit dari ketidakberdayaan. Gerakan perempuan juga mulai mengarah pada bagaimana perempuan dapat memperoleh akses kepada pembangunan dan terlibat dalam urusan tata pemerintahan. Benih-benih semangat bagi perempuan Aceh untuk diperlakukan adil dengan kaum laki-laki semakin tinggi dan meluas. Meski disadari kala itu stigma orang RI dan GAM membuat kendala tersendiri dalam menggalang konsolidasi para aktifis perempuan Aceh.

Saat DOM dicabut, kemudian intensitas konflik antara kedua belah pihak semakin tinggi. Seturut dengan tingginya intensitas konflik perempuan Aceh, pada saat itu digalang oleh BKOW, menginisiasi diadakannya *Dialog Ureung Inoeng Aceh*, pada 26 Desember 1999. Dari dialog itulah yang kemudian menghasilkan rekomendasi untuk melaksanakan Duek Pakat Ureung Inoeng Aceh I dengan mengusung tema perdamaian. Gagasan membuat kongres perempuan datang juga dari Yayasan Pengembangan Wanita (YPW). Diakui oleh Samsidar bahwa dirinya, Azriana serta teman-teman aktifis perempuan lainnya mempunyai gagasan akan membuat kongres perempuan di Aceh. Bahkan komunikasi mengenai hal ini sudah dilakukan dengan teman-teman Kalyanamitra di Jakarta. Namun demikian gagasan ini urung dilakukan karena mempertimbangkan kekuatan dan situasi yang kurang menguntungkan. Namun setidaknya gagasan-gagasan perdamaian sudah mulai diperbincangkan bagi kalangan aktifis perempuan dalam mengukir sejarah bahwa gagasan perdamaian muncul pertama kali dari kaum perempuan.

Pada masa-masa ini banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap masyarakatnya. Kasus-kasus yang dialami perempuan meliputi penculikan, penyiksaan, pemerkosaan hingga kerusakan terhadap alat-alat reproduksi, semua terekam dan terdokumentasi dengan baik. Pada saat itu kegiatan yang bisa dilakukan adalah melakukan investigasi untuk pelanggaran HAM. YPW juga melakukan pendampingan dan memfasilitasi masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok

masyarakat sipil. Pembentukan ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut agar mampu melakukan advokasi bagi dirinya. Sebelumnya YPW juga Melakukan penelitian agar DOM dicabut.

Semasa DOM pada tahun 1998, kerja-kerja yang dilakukan oleh gerakan perempuan dilakukan diam-diam dan tidak terlalu berani terang-terangan. Belum banyak orang yang berbicara HAM. Bahkan menurutnya juga ketika berbicara HAM, banyak teman-teman dari NGO yang menganggap remeh, menganggap itu tidak penting. Karena pada saat itu pengaduan kasus pelanggaran HAM menjadi fokus perhatian banyak aktifis sehingga dalam rangka mendapat dukungan dia melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak.

Sebelum DOM dicabut, YPW melakukan penelitian agar DOM dicabut. Sayangnya apa yang dilakukan ini cenderung diidentikkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada konteks nasional saat itu PDIP menjadi oposisi bagi penguasa. Melalui gerakan parsial yang dilakukan oleh aktifis perempuan, kemudian berhimpun dengan aktifis perempuan di Jakarta mengangkat persoalan Aceh di tingkat Nasional, membicarakan persoalan tersebut ke Komnas HAM.

Pada 1998, YPW juga mendampingi korban untuk bertemu pelapor khusus PBB di Komnas Perempuan. Pada saat itu pun Samsidar terpilih sebagai komisioner Komnas Perempuan. Pernyataannya pada saat itu adalah bahwa untuk mengetahui kerusakan yang diakibatkan oleh DOM harus turun ke lapangan dan operasi militernya sangat tersembunyi. DOM melakukan operasi militer di wilayah-wilayah terpencil, sehingga sulit untuk dilakukan pemantauan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pencabutan DOM ditempuh dengan berbagai upaya dari berbagai elemen yang menginginkan Aceh terjadi kedamaian. Sehingga DOM di Aceh tidak pernah dicabut hanya karena kebaikan penguasa. Bagi perempuan sendiri, upaya untuk mencabut DOM juga dilakukan bahkan selama bertahun-tahun, meski dilakukan secara tidak terang-terangan. Di samping itu pula apa yang dilakukan oleh YPW lebih banyak bekerja dengan korban dan kampanye pada pihak-pihak lain di luar Aceh.

Banyak aktor perempuan yang terlibat saat itu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Aktifis perempuan saat itu hanya beberapa yang dari NGO, selebihnya lebih banyak berasal dari komunitas seperti guru, bidan, perawat dan lain-lain. Strategi yang ditempuh oleh aktifis perempuan saat itu adalah mendorong lebih banyak aktifis perempuan yang muncul di permukaan sehingga kerja-kerja advokasi menjadi lebih ringan. Menurut pandangan beberapa aktifis sebagai pelaku sejarah, pada saat itu gerakan perempuan belum terkonsolidasi.

2.2 Inisiatif Damai melalui Duek Pakat Inong Aceh (DPIA-I) tahun 2000

Pada akhir tahun 1999 hingga awal tahun 2000 tuntutan agar diselenggarakan referendum di Aceh semakin menguat. Perhatian publik baik provinsi maupun nasional lebih banyak tercurah pada isu-isu referendum. Pada awal tahun 1999, tertera dalam catatan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) bahwa pada bulan Februari 1999 telah mulai dikampanyekan referendum bagi Aceh. Dalam masa ini Aceh telah melewati

tahap dicabutnya status Daerah Operasional Militer (DOM) pada 7 Agustus 1998. Aceh memasuki babak baru dalam suasana reformasi di tingkat nasional yang tentunya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengambilan keputusan nasional. Spanduk-spanduk dan poster yang menyuarakan referendum terpampang di sudut-sudut strategis kota Banda Aceh dan Masjid Raya Baiturrahman.

Gelombang isu referendum semakin memuncak, tetapi di sisi lain pembunuhan terus menerus terjadi pada November 1999. Dalam catatan Suara Pembaruan (30/11/1999) dikatakan bahwa terjadi pembunuhan setiap hari terhadap tentara dan polisi serta tidak teridentifikasi jumlah korban sipilnya, kemudian tercatat pula gencarnya isu eksodus di lokasi transmigrasi bagi warga non-Aceh. Suasana makin memanas dan dimana-mana isu referendum dibicarakan, tetapi catatan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat pun banyak belum mengerti makna referendum. Ditambah lagi dengan keluarnya maklumat resmi dari GAM untuk meminta dilakukan referendum di Aceh.

Dalam situasi tersebut sebagaimana yang dipikirkan oleh beberapa kelompok perempuan, beberapa LSM seperti Miski, Flower, KKTGA dan beberapa organisasi lainnya, mengambil inisiatif untuk mengumpulkan perempuan Aceh dalam satu kongres besar perempuan Aceh. Secara kebetulan juga pada saat itu Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) pada tingkat provinsi ingin memperingati hari ibu pada 22 Desember 1999. Pada akhirnya gagasan membuat kongres perempuan Aceh ini menjadi bertambah besar karena mendapat dukungan dari LSM dan BKOW.

Meski kekuatan dukungan dari kalangan perempuan di kabupaten/kota kian membesar, tantangan yang dihadapi pun juga semakin besar. Tantangan itu bersifat faktor penghambat suksesnya pelaksanaan kongres DPIA. Hal ini terungkap dalam catatan testimoni pelaksanaan kongres DPIA yang disusun oleh Flower Aceh. Pada saat itu bertemulah gagasan akan pentingnya kongres perempuan baik BKOW maupun pihak LSM. Sehingga selanjutnya terjadilah sinergi kerja dalam melaksanakan kongres yang tujuan utamanya ingin mengkonsolidasikan kehendak aspirasi perempuan Aceh pada tingkat tata pemerintahan dan penentuan nasib bagi Aceh.

Cukup banyak perempuan yang terlibat saat itu. Pada Duek Pakat para aktifis perempuan sudah berkomitmen agar semua bisa terlibat, mulai dari tingkat elit sampai tingkat bawah, sampai ke korban. Bahkan untuk Duek Pakat itu, para aktifis juga menjumpai Tengku Abdullah Syafii, panglima GAM saat itu, untuk meminta supaya pasukan inoeng balee juga bisa hadir dalam duek pakat itu.

Saat itu keinginan panitia ingin mempersatukan perempuan dari berbagai level. Dengan agenda mendorong agar konflik Aceh diselesaikan tidak dengan kekerasan, kemudian panitia juga mendorong upaya-upaya tertentu agar perempuan Aceh diberdayakan serta memikirkan bagaimana dengan kondisi konflik yang panjang, tidak menimbulkan juga dendam yang berlarut. Ketika ingin menyelesaikan masalah Aceh, maka dipandang penting juga memikirkan bagaimana memutuskan rantai dendam itu.

Kegiatan tersebut secara resmi dihadiri sekitar 437 orang. Dibentuk dalam empat seksi; (1) perempuan dan politik, (2) perempuan dan perdamaian, (3) perempuan dan seni

budaya, dan (4) perempuan dan pendidikan. Luar biasanya, pengaruh duek pakat itu, bukan hanya untuk gerakan perempuan di Aceh tapi juga gerakan untuk penyelesaian konflik itu sendiri. Selanjutnya, hasil rekomendasi duek pakat itu diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Presiden menindaklanjutinya dengan mengirimkan Bondan Gunawan Sekretaris Presiden dalam rangka menjumpai panglima GAM. Kedatangan Bondan Gunawan ini belum dapat serta merta diklaim bahwa pertemuan tersebut terjadi karena hasil kerja teman-teman perempuan, karena bisa jadi bertemunya dua pihak bertikai itu memang sudah ada rencana sebelumnya. Atau bisa jadi atas dorongan hasil pertemuan kelompok perempuan Aceh dengan Presiden yang menyampaikan rekomendasi penting hasil Duek Pakat Inoeng Aceh. Apapun penyebabnya, geliat perempuan menyuarakan perdamaian telah memberikan pengaruh yang luar biasa.

Seperti diuraikan sebelumnya, kiprah perempuan di Aceh pernah mencapai masa gemilang dimana terdapat penghargaan yang hakiki terhadap eksistensi perempuan. Namun demikian, masa-masa ini surut disebabkan faktor penjajahan kolonial Belanda dan perang berkepanjangan di Aceh. Meski begitu, denyut kebangkitan perempuan tidak lagi ditandai oleh munculnya sosok-sosok perempuan seperti Ratu Safiatuddin, Nahrasiyah dan lain sebagainya. Kebangkitan perempuan di Aceh ditandai oleh munculnya organisasi-organisasi perempuan yang secara masif dan berkelanjutan mendampingi korban konflik, peran-peran negosiasi, pembebasan orang-orang yang ditangkap dan hilang. Gerakan yang secara masif ini akhirnya bertemu pada kongres DPIA yang pada akhirnya diakui sebagai konsolidasi besar-besaran perempuan di Aceh.

Memang rasanya masih mengganjal jika dikatakan "perempuan Aceh", karena seakan-akan menggeneralisir perempuan-perempuan lain yang tidak ikut dalam DPIA. Perempuan Aceh yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu kumpulan beberapa orang perempuan Aceh yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi atau kelompok. Dengan istilah lain disebut dengan gerakan perempuan Aceh. Apapun rasionalitas yang dibangun dapat disimpulkan perempuan Aceh telah berani mengambil sikap atas kondisi tanah kelahiran yang dicintainya Nanggroe Aceh Darussalam. Sikap tersebut tidak saja dilontarkan melalui lisan tetapi dibuktikan dengan mengikuti DPIA dan menyuarakan rekomendasi bagi perdamaian di Aceh. Disinilah peristiwa dimana perempuan Aceh kembali ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam tata pemerintahan di Aceh.

Menurut keterangan dari salah satu aktifis perempuan yang juga salah seorang stering committee DPIA, sebelum duek pakat itu telah terbentuk Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK). Latar belakang pembentukannya adalah bahwa ketika itu terlihat ada banyak persoalan pengungsian. Saat itu hampir semua aktifis perempuan Aceh jadi relawan di RPUK, dan pada saat itu bisa dikatakan gerakan perempuan Aceh sudah mulai terkonsolidasi. Waktu itu mulai diperhatikan perlunya penanganan khusus untuk perempuan.

Salah satu kontribusi yang mengilhami lahirnya Duek Pakat Inoeng Aceh adalah kongres perempuan nasional. Meskipun sebenarnya kontributor utama adalah aktifis-aktifis perempuan di Aceh yang sudah mulai terkonsolidasi pada masa DOM. Bila ditarik ke

belakang, di tingkat nasional proses konsolidasi gerakan perempuan ini diinisiasi oleh aksi organisasi perempuan seperti Poetri Mardika (1912) yang mendorong pemerintah Belanda untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan setara. Mukhotib MD menulis pada artikel berjudul "Menemukan Akar Gerakan Perempuan Indonesia", gerakan perempuan dapat dikatakan sebuah gerakan ketika gerakan itu sungguh-sungguh mengusung hak-hak bagi perempuan lainnya secara universal. Poetri Mardika misalnya, selalu memperjuangkan mengenai kebebasan dan akses perempuan yang setara dengan laki-laki.

Pada masa itu tidak hanya Poetri Mardika saja yang menonjol, dalam catatan Mukhotib setelah ini berdiri banyak perkumpulan perempuan baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri. Sebut saja misalnya, Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun—PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924). (Sukanti Suryochondro: 1995). Dalam catatan sejarah, hampir setiap organisasi perempuan ini, menerbitkan majalah mereka sendiri sebagai media untuk membentuk opini publik sehingga gagasan-gagasan mereka terkomunikasikan ke dalam masyarakat luas.

Gerakan perempuan Indonesia akhirnya terkonsolidasi dengan cukup baik secara nasional pada 22 Desember 1928 ditandai dengan dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Kongres ini melahirkan semacam federasi organisasi perempuan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dan pada tahun 1929, setahun setelah terbentuknya, diganti menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada awal berdirinya, upaya-upaya yang dilakukan adalah perhatian pada lingkungan keluarga dan masyarakat, kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam), pendidikan dan perlindungan anak-anak, pendidikan kaum perempuan, perempuan dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, nasib yatim piatu dan janda, pentingnya peningkatan harga diri perempuan, dan kejahatan kawin paksa.

Meskipun bisa dikatakan DPIA ini terilhami oleh adanya Kongres Perempuan Indonesia tetapi tidak seratus persen. Bedanya DPIA secara substansial sudah lebih maju dibanding kongres tersebut dimana DPIA mengajukan posisi tawar dalam hal keterwakilan perempuan 30% dalam berpolitik. DPIA juga melahirkan semacam jaringan kerja dengan sistem presidium yang diberi nama Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA). BSUIA ini yang kemudian mengawal seluruh mandat DPIA.

Kongres Perempuan II dilaksanakan bulan Maret 1932, dimana pada kongres ini mendorong isu berkaitan dengan trafficking, kesehatan sanitasi dan munculnya isu nasionalisme dan politik. Pada masa ini gerakan perempuan semakin berani dan masif ditandai dengan para aktifis perempuan dalam Sarekat Rakyat mengorganisasikan demonstrasi politik untuk buruh perempuan dengan tuntutan kenaikan upah, kesejahteraan buruh dan keselamatan kerja. Di Semarang, pada 1926 Sarekat Rakyat ini

pernah menuntut perbaikan kondisi kerja bagi buruh perempuan, dengan memakai caping kropak. Gerakan ini terus menggelinging hingga beberapa perempuan masuk dalam birokrasi seperti Maria Ulfa menjadi menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K. Trimurti menjadi menteri Perburuhan pada kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948) serta beberapa perempuan masuk menjadi anggota parlemen pada pemilu 1955. Sayangnya setelah masa-masa itu, gerakan perempuan surut dan tidak terdengar lagi apalagi di jaman orde baru.

Kembali dalam konteks keacehan, pada tataran strategi, pendekatan yang digunakan oleh gerakan perempuan di Aceh berbeda dengan gerakan pada konteks nasional. Misalnya dalam konteks nasional, pada masa penjajahan Belanda, perempuan ditempatkan pada martabat yang paling rendah. Sekolah hanya milik laki-laki dan kekuasaan memilih pasangan tidak dimiliki perempuan. Maka yang direbut adalah mendorong kesetaraan mendapatkan hak-hak dasarnya termasuk dalam perkawinan. Di Aceh, konflik yang berkepanjangan dari kolonial Belanda hingga Indonesia membuat perempuan Aceh dalam kondisi mendapat tekanan kejiwaan yang mendalam. Perempuan Aceh pada masa lalu pernah mendapat tempat yang setara dan mendapat akses yang sama dalam pemerintahan, namun perjalanan panjang perempuan dibungkam dengan segala cara hingga tidak berdaya dan tidak berupaya untuk bangkit. Sehingga momentum DPIA merupakan suatu media untuk mendorong dan memperjuangkan kiprah perempuan dalam berpolitik dan menjalankan syariat Islam tanpa terdiskriminasi secara proporsional.

Perlu disampaikan kembali bahwa DPIA merupakan konsolidasi perempuan yang pertama sekali dapat merangkul semua elemen organisasi perempuan. Namun disayangkan kuatnya intimidasi agar DPIA ini tidak terlaksana atau gagal cukup kuat. Intimidasi tersebut terjadi pada calon peserta maupun kepanitian. Salah satu pernyataan dari salah seorang penyelenggara, "panitia juga tertekan, agak sulit bagi kami menentukan agenda hasil kongres itu adalah damai atau referendum?" Di satu pihak menginginkan hasil akhir dari DPIA adalah perempuan mendukung terjadinya damai di Aceh, sementara di lain pihak juga menginginkan agar perempuan bersepakat mendukung referendum. Buah simalakama bagi penyelenggara DPIA.

Namun pada akhirnya, melalui perdebatan yang cukup panjang DPIA menghasilkan keputusan-keputusan yang nantinya akan membawa Aceh pada perubahan. Rekomendasi yang dihasilkan DPIA sudah cukup jelas yaitu perdamaian, selesaikan masalah Aceh dengan damai, serta mendorong pelibatan penuh perempuan dalam proses perdamaian. Dan hasil-hasilnya cukup menakjubkan karena rekomendasi kongres ini terumuskan dengan baik. Hasil rekomendasi duek pakat itu selanjutnya dibawa ke presiden dan juga ke tingkat internasional.

Beberapa kalangan menyebut DPIA ini sebagai era kebangkitan pergerakan perempuan Aceh kembali selepas DOM. Dengan kondisi yang serba 'terbatas' perempuan-perempuan dari seluruh daerah di Aceh bisa terhimpun. Hasil kongres itu cukup luar biasa. Banyak rekomendasi yang dilahirkan yang kemudian bisa diteruskan kepada Pemda. Dampak selanjutnya yang dapat dibuktikan adalah semakin banyaknya perempuan-perempuan yang ikut terlibat dalam beberapa organisasi perempuan.

DPIA menginginkan agar perempuan dilibatkan dalam proses menuju penyelesaian masalah Aceh dan masalah konflik tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekerasan. Selain itu, saat kongres tersebut juga direkomendasikan agar dalam perpolitikan di Aceh perempuan mempunyai kuota 30% keterlibatan perempuan proses dalam pencalonan legislatif oleh partai. DPIA itu sangat positif untuk perempuan Aceh. Pada kondisi tersebut, sangat sulit lagi menyebut tokoh-tokoh pergerakan perempuan karena memang pergerakan ini masif dan masing-masing mempunyai kontribusi yang besar. Disadari pada masa itu pergerakan perempuan tak akan bisa bergerak sendiri tanpa dukungan unsur-unsur yang lain.

Hasil DPIA tersebut menyebabkan sekelompok perempuan tidak bersepakat dan melakukan aksi *walk out* (WO) untuk mengaspirasikan bahwa pendapatnya tidak terakomodir. Salah seorang pendukung WO itu menyatakan Duek Pakat hanya untuk mencari legalitas perempuan-perempuan Aceh. Dengan legalitas itu maka bisa dikatakan beginilah yang diinginkan perempuan Aceh. Kegiatan tersebut mempunyai situasi politik yang sangat kental. Bahkan dikatakan lagi, meski asumsi yang masih debatable mengatakan bahwa Duek Pakat dilaksanakan sebagai reaksi dari Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR). Dan beliau melihat bahwa itu sebenarnya bukan kemauan masyarakat perempuan Aceh, tapi lebih kepada kemauan Jakarta. Mencari legalitas perempuan sebagai reaksi dari suksesnya tuntutan referendum dari rakyat Aceh.

Meski berbeda pendapat, perbedaan itu didiskusikan secara terbuka dan demokratis. Dalam konteks Aceh pada masa konflik dengan situasi satu sama lain saling curiga dan terdiri dari banyak sekali pihak baik dari LSM, GAM, Pemerintah, guru, bidan dan sebagainya sangatlah luar biasa konsolidasi perempuan Aceh dapat berlangsung terus. Seperti dikemukakan di atas DPIA melahirkan organisasi yang mengawal hasil-hasil kesepakatannya yaitu Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA). Salah satu rekomendasi yang harus dijalankan adalah melaksanakan KRA (Kongres Rakyat Aceh). Namun dalam perjalanannya KRA tidak dapat terlaksana karena kondisi Aceh kian memanas dan kecurigaan makin tinggi dalam masyarakat.

BSUIA untuk pertamakalinya dipimpin oleh Syarifah Rahmatillah disamping terpilih juga presidium diantaranya Naimah Hasan, Samsidar, Azriana, Ruqaiyah Ibrahim Naim dan Rosni Adam. Pada tengah perjalanannya hingga pasca CoHA, kepemimpinan Syarifah digantikan oleh Naimah Hasan, dan melalui sidang yang demokratis terpilih Nursiti sebagai pemimpin BSUIA hingga kini. Pada masa Nursiti kepemimpinannya sempat *off* dan digantikan sementara oleh Ria Fitri, dan saat ini kembali kepada Nursiti.

Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) dapat dikatakan sebagai momentum sejarah dimana perempuan Aceh secara masif ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Meski demikian, selain sejarah seputar peristiwa yang monumental tersebut, DPIA juga merupakan kekayaan sejarah atas pengalaman yang dialami perempuan Aceh. Sejarah yang sebelumnya diwarnai kekerasan, berlanjut tingginya keinginan akan referendum, dan setelah itu tingginya otoritas militer, hingga sekarang pada fase perdamaian dan reintegrasi.

Pada masa mendorong proses perdamaian tahun 2000, gerakan perempuan harus berhadapan dengan tuntutan harus mengambil sikap tegas dan tentunya disadari akan menimbulkan resiko yang tinggi. Perlakuan yang kurang wajar dilakukan oleh pihak yang tidak senang akan perdamaian, seperti dilempar tomat dan buah-buahan busuk kepada para aktifis serta dikejar-kejar dengan alasan yang tidak bisa dimengerti. Bentuk-bentuk teror yang lain seperti penculikan dan pembusukan karakter telah biasa mereka terima.

Meski teror yang cukup menyakitkan harus dihadapi dengan tabah seperti yang dialami oleh salah seorang penggagas DPIA. Teror yang diterima selalu dihadapi dengan pikiran rasional. Salah satu cuplikan tanya jawab ketika dirinya didatangi karena terlibat dalam tim delegasi di Henry Dunant Center (HDC). Sepasukan berseragam menggerebek rumahnya kemudian bertanya, “mengapa kamu ikut-ikutan dalam delegasi itu?”. Dengan cukup rasional dan tanpa takut dijawab dengan pertanyaan, “apakah sebagai warga negara saya salah ikut memikirkan perdamaian di Aceh?”. Dengan cara-cara menjawab yang rasional dan menurunkan emosional membuat pasukan berseragam itu pergi dan tidak jadi menangkapnya.

Disadari pada masa itu bahwa gerakan perempuan terpolar dalam dua kutub kepentingan. Kutub pertama mendorong upaya-upaya referendum dan kutub kedua mendorong upaya-upaya damai. Keduanya memilih pendekatan untuk mencapai cita-citanya dengan cara diplomasi. Mainstream pada saat itu adalah Aceh meminta referendum dilakukan, sehingga gerakan perempuan tidak populer dan malah menjadi ancaman.

Secara umum penyelenggaraan DPIA berlangsung dalam situasi yang kurang kondusif dan cukup menghambat aktivitas pihak penyelenggara. DPIA sejatinya dilakukan dalam rangka ini mencari solusi damai dengan cara-cara yang demokratik. Dalam prakteknya penyelenggara DPIA ini menghadapi hambatan berupa pelecehan, intimidasi dan ancaman selama berlangsung kegiatan. Salah satu contohnya adalah ada sekelompok orang yang berupaya mencegah 80 peserta menghadiri kongres. Salah seorang bagian dari tim Organizing Committee (OC) juga mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan seperti nada-nada kebencian dalam surat ataupun telepon yang meminta dirinya keluar dari kongres. Kemudian ancaman yang datang menjadi lebih sering dan membingungkan karena dirinya diwanti-wanti agar keputusan kongres menyatakan pro-referendum, sementara di lain pihak dirinya dipaksa agar mengambil keputusan kongres untuk anti-referendum.

Tercatat dalam dokumen DPIA beberapa kendala yang dihadapi perempuan ketika ingin menghadiri DPIA. Situasi yang sarat dengan intimidasi harus dihadapi oleh salah seorang Korlap (koordinator lapangan) yang mencoba bersikap lebih netral dan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai tujuan DPIA kepada calon peserta. Agaknya, sikap tersebut tidak bisa diterima oleh korlap yang lain karena dianggap mengingkari aspirasi mayoritas penduduk yang menuntut DPIA agar memberi dukungan pada pilihan referendum. Akibat perdebatan tersebut, korlap tersebut lebih suka menarik diri dan keluarga korlap bersangkutan sempat ditahan dan memperoleh ancaman dari para pendukung referendum.

Masalah intimidasi juga dihadapi secara langsung oleh Korlap Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, ketika sedang berupaya mencari calon peserta di wilayah masing-masing yang selama ini oleh pihak tertentu dianggap kurang berminat pada isu referendum. Bahkan intimidasi ini dirasakan, oleh para peserta dan korlap semenjak berangkat, di dalam perjalanan hingga penyelenggaraan kongres DPIA. Sedangkan besarnya biaya transportasi dan akomodasi juga dirasakan oleh korlap Aceh Tenggara, yang harus melewati jalur Medan untuk mencapai Banda Aceh.

Tidak adanya jaminan keamanan dan kenyamanan juga dialami sepenuhnya oleh para korlap Aceh Utara, ketika mendampingi delegasi wilayah mereka. Apalagi pengemudi bus yang disewa mereka, termasuk salah seorang pendukung isu referendum dan kurang berkenan pada sikap netral kaum perempuan. Namun berbekal ketegaran jiwa dan niat yang lurus untuk duduk bersama dalam sebuah kongres; telah berhasil mengantar mereka ke Banda Aceh dengan selamat.

Bicara sebuah pertemuan besar seperti melaksanakan DPIA, ternyata bukan hal yang mudah. Di balik kendala internal dan eksternal, perempuan mempunyai keinginan besar untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan menyangkut Aceh. Beberapa orang yang mencatat peristiwa penting ini diantaranya Carla Bianpun menulis tentang "*Acehnese Women Drop Referendum Demand*" di Indonesian Observer, 28 Februari 2000, kemudian Sri Tati Nurmulyati tentang "Aceh dan Harapan Perubahan Mendasar" dilansir pada Media Indonesia 22 Maret 2000, dan Debra Yatim berjudul, "*Men, Students in Quandary, Acehnese Women Map Future*" termuat di Jakarta Post 27 Februari 2000.

Naimah Hasan berbicara pada Nikoya FM yang dilaporkan Swaranet 2002 demikian: "Saya fikir semua orang kalau mau objektif harus melihat bahwa Duek Pakat Inong Acehlah kongres perempuan Aceh pertama yang mengusung tema perdamaian untuk konflik Aceh. Sebelumnya tidak pernah orang satupun yang bicara damai, walaupun setelah Duek Pakat itu banyak orang yang menjadi pahlawan perdamaian. Tapi saya yakin betul kalau kita mau objektif, tidak ada satupun yang mau berbicara damai pada waktu itu. Temanya pun sudah jelas yaitu *Duek Pakat ini Krue Seumangat Ureung Inong Aceh, Bak duek Pakat Ureung Inong Aceh, keu damai, adil, untuk rakyat Aceh.*"

DPIA merupakan sebuah peristiwa dimana perempuan bersuara di tengah-tengah tekanan kekerasan masa perang. Perempuan mulai angkat bicara kemudian mengadvokasi perdamaian dan mengkampanyekan konsep anti militer. Pada 20 - 22 Februari 2000 sekitar 450 perempuan Aceh women menghadiri DPIA. Even ini menurut Bianpoen, tidak hanya karena pertama kalinya sejak kurang lebih 400 tahun perempuan berbicara tentang hak-haknya dalam ruang publik tetapi juga mereka menolak intimidasi dan ancaman pada kehidupannya.

Kesepakatan yang tertuang dalam 22 butir, mengandung makna meletakkan perdamaian dan keadilan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kesepakatan-kesepakatan dalam DPIA ini yang kemudian dapat dianggap sebagai kontribusi gerakan perempuan terhadap perdamaian. Pada momentum ini perempuan meminta terlibat dalam kancah politik di Aceh dengan komposisi 30% dalam politik dan institusi pengambil kebijakan.

Hal ini didukung oleh rekomendasi kongkret tentang strategi terlibat dalam pembangunan mencakup di dalamnya politik, ekonomi, perubahan sosial, pencapaian perdamaian dan realisasi hukum Islam dan Adat. Kesepakatan DPIA mendukung hukum Islam dijadikan basis hukum, dan meyakini bahwa Islam mengajarkan adanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Dan inipun seharusnya terjadi dalam institusi adat dalam masyarakat. DPIA juga mendorong agar perempuan memiliki akses dalam perekonomian. DPIA mendorong pemerintah untuk menarik tentara dari provinsi. Kesepakatan ini lahir bukan tanpa perdebatan yang tinggi di dalam peserta DPIA, sekitar 20 orang *walk out* karena tidak setuju dengan beberapa kesepakatan dan menginginkan referendum. Ini membenarkan apa yang diakui oleh Maryati bahwa dirinya merupakan salah satu dari aksi *walk out* saat DPIA.

Secara representasi para pihak yang hadir sangat bervariasi diantaranya terdiri dari kalangan pelajar, perempuan yang didukung oleh GAM, perempuan yang berasal dari institusi pemerintahan dan LSM. Proses yang cukup democratic ini tidak pernah sukses dilakukan sebelumnya. Mengutip pernyataan Dr M. Gade Ismail dari Universitas Syiah Kuala yang dilansir pada Jakarta Post, 27 Februari 2000, "Banyak nilai lebih dari DPIA, disini perempuan telah menunjukkan pada laki-laki dan mahasiswa bagaimana perempuan menyelesaikan perbedaan pendapat secara demoratis."

2.3 Kontribusi Perempuan dalam Jeda kemanusiaan 2000

Banyak pendapat yang berkembang baik yang disampaikan pengamat dari Aceh, Jakarta serta pengamat internasional menyatakan bahwa peristiwa jeda kemanusiaan antara RI dan GAM yang telah berlangsung di Geneva adalah satu-satunya harapan untuk penyelesaian konflik/ketegangan antara bangsa Aceh dengan RI. Sehingga pernyataan Menhan RI Mahfud MD pada 20 Desember 2000 yang menyatakan tidak lagi akan melanjutkan dialog dengan GAM menjadi banyak polemik kekecewaan dan kegembiraan dari berbagai pihak.

Kekecewaan timbul dari kalangan rakyat awam yang mendambakan keamanan dan ketentraman, tanpa peduli apa motif politik Mahfud dan regim RI di belakang pernyataannya itu. Bagi rakyat kebanyakan, yang terpenting adalah ketentraman dan ketenangan. Kehidupan dapat berfungsi normal seperti warga negara RI di tempat lain. Tidak peduli siapa yang berkuasa dan memegang pemerintahan. Harapan rakyat bahwa Jeda Kemanusiaan yang disponsori oleh badan dunia untuk kemanusiaan ini, dapat menolong rakyat Aceh lepas dari belenggu konflik yang berkepanjangan.

Jeda kemanusiaan dalam sejarah konflik di Aceh merupakan momentum awal bertemunya pihak-pihak berkonflik dalam meja perundingan. Meski jeda kemanusiaan dikatakan sebagai momentum pertama kalinya Pemerintah RI dan GAM menghentikan peperangan untuk kemanusiaan, namun kondisi di Aceh semakin memanas, situasi keamanan sangat buruk suasana saling curiga sangat kental. Intimidasi terhadap aktifis cukup tinggi, dan saat itu gelombang evakuasi bagi para aktifis gerakan cukup tinggi.

Jeda kemanusiaan melahirkan dua komite yang dibentuk oleh dua pihak yang bertikai yaitu Komite Bersama untuk Kemanusiaan dan Komite Bersama untuk Keamanan. Keterlibatan perempuan pada hal ini kelihatannya menjadi prasyarat karena terbukti

setiap perwakilan yang duduk dalam komite ini melibatkan perempuan. Dalam KB-Kemanusiaan delegasi RI yang ditunjuk adalah Naimah Hasan (mewakili RI) sedangkan dari delegasi GAM pada saat itu adalah Cut Nur Asikin, selanjutnya duduk dalam komite tersebut seperti Tg. Kamaruzzaman dan sebagainya.

Perempuan dalam Komite Bersama untuk Keamanan pada saat itu tidak ada satupun yang terlibat. Diantara nama-nama yang terlibat dalam KB-Keamanan adalah delegasi GAM yaitu Tg. Ilyas, Amdi dan Amni, sedangkan yang duduk dalam delegasi RI adalah Ridwan Kasim (alm.) dan Rismawan, serta Sulaiman AB. Dalam rangka pengawasan terhadap komite ini dibentuk suatu tim monitoring, yang terdiri dari tim monitoring untuk kemanusiaan. Dalam tim monitoring kemanusiaan duduk diantaranya Syarifah Rahmatillah, Gani Nurdin (alm.), Maimul Fidar (alm.), Gade Ismail (alm.), Abdul Ali (alm.). Kemudian dalam tim monitoring keamanan terdapat nama-nama seperti Yusny Saby, Otto Syamsuddin Ishak, dan lain-lain.

Bagi Hendry Dunant Center (HDC) sebagai pihak yang memfasilitasi terjadinya perundingan damai, penyelesaian di Aceh menggunakan format baru yang tidak pernah digunakan pada penyelesaian konflik yang pernah dilakukannya. Sehingga format penyelesaian konflik atau proses perdamaian dilakukan seperti tersebut di atas disusun secara bersama-sama tanpa konsep yang diberikan oleh HDC. Jeda kemanusiaan dapat dikatakan momentum dimana pihak-pihak bertikai di Aceh mulai membangun visi, membangun orientasi, menyamakan main set dan mulai berdialog.

Bagi aktifis perempuan kondisi seperti ini memberi kesejukan dan sekaligus menegangkan. Seberkas kesejukan dirasakannya ketika HDC berada di Banda Aceh untuk menemui berbagai pihak dari berbagai kalangan untuk menerima input-input terhadap rencana mengisi ruang jeda kemanusiaan yang akan berlangsung mulai 2 Juni 2000. Sedangkan ketegangan dijumpai ketika laporan di media massa menunjukkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Kejadian di Aceh Utara mengorbankan 4 perempuan dan 1 laki-laki mengalami luka yang cukup parah akibat terjangan peluru aparat yang melakukan *sweeping* serta tembakan brutal ke segala arah. Selanjutnya masih di Aceh Utara, kali ini 8 laki-laki jadi mayat karena diterjang peluru.

Dalam catatan harian Suraiya Kamaruzzaman, informasi di atas masih membingungkan karena antara pihak kepolisian dan GAM berbeda. Menurut Polisi (seperti biasanya) mereka adalah GAM dan dilengkapi dengan barang bukti. Dan menurut GAM (seperti biasanya juga) menyatakan bahwa mereka bukan anggotanya. Suraiya merasa tidak ada informasi yang dapat dipercaya mengenai siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa-peristiwa tersebut. Menurutnya, siapa saja yang punya senjata dan kemudian mempergunakan senjatanya tanpa prosedur yang jelas dan membunuh orang yang tidak punya senjata sama jahat dan gilanya. Dan orang tersebut termasuk kelompok penjahat kemanusiaan yang harus mempertanggungjawabkan aktifitasnya dihadapan Tuhan. Tetapi sebelum proses itu berlangsung, yang pertama sekali orang tersebut harus diseret ke pengadilan sebagai penjahat kemanusiaan.

Informasi diatas merupakan salah satu spot mengenai perspektif perempuan Aceh yang dirasakan dan dialami. Selanjutnya mengenai dialog-dialog pada saat perundingan damai

dilakukan, masih dirasakan tidak bijaksana atau masih memunculkan ego masing-masing. Beberapa komentar dari dua belah pihak seharusnya tidak terlontar saat perundingan terjadi. Pada saat perundingan tersebut seharusnya ada kerelaan hati dari dua belah pihak agar menahan diri agar tidak mengeluarkan statemen-statemen politik yang terkadang bisa melukai salah satu pihak yang sedang berunding. Atau berusaha untuk meminimalisir segala hal yang bisa menjadi penghalang dalam proses perundingan ini.

Hal ini menunjukkan impresi adanya harapan yang begitu besar dari kaum perempuan untuk terciptanya damai di Aceh. Hal ini juga merupakan suatu keinginan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak perempuan di Aceh, utamanya yang mengikuti Duek Pakat Inong Aceh. Begitu berat ancaman dan intimidasi yang harus mereka terima ketika tema utama yang dibicarakan adalah tentang “Aceh, aman, adil dan makmur”. Dan ternyata gagasan kaum perempuan tentang perdamaian sedang berproses ditandai adanya perundingan tingkat tinggi antara pihak berkonflik. Meski demikian tersurat harapan bahwa perundingan yang dilakukan ini haruslah perundingan yang didasari dengan keikhlasan kedua belah pihak untuk berdamai. Kekhawatiran ini dirasakan hampir terjadi pada sebagian kaum perempuan pada waktu itu.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah posisi perempuan? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketika suatu tempat menjadi daerah konflik atau menjadi daerah operasi militer, maka korban utamanya adalah perempuan. Perempuan sangat menderita baik batin maupun fisik. Betapa banyak perempuan yang terpaksa menjadi janda dan harus menanggung beban hidup terhadap anak-anak yang ditinggalkan suami yang telah mati diterjang peluru. Betapa banyak perempuan yang mengalami trauma. Betapa banyak pula perempuan telah menjadi korban keganasan seksual karena mereka diperkosa dan harus menanggung beban malu dan sebagainya. Buruknya nasib perempuan di Aceh yang terseret dalam konflik politik yang berkepanjangan tersebut menjadi satu alasan mengapa kaum perempuan Aceh melaksanakan “duek pakat” beberapa waktu yang lalu. Ketika laki-laki yang selalu duduk bersama untuk menentukan perang atau tidak, perempuan tidak pernah dilibatkan di dalamnya. Perempuan tampaknya tidak pernah diperhitungkan, padahal 52 % penduduk adalah perempuan (Aceh), tetapi perempuan selalu jadi korban. Bahkan, ketika hasil duek pakat pun adalah “damai” perempuan mendapat intimidasi paling banyak dari laki-laki. Namun, tanpa mengindahkan intimidasi, perempuan tetap bekerja untuk upaya-upaya damai itu, melalui komite damai yang merupakan salah satu rekomendasi dari kongres.

Berdasarkan hal-hal di atas Suraiya menambahkan bahwa upaya damai yang sekarang sedang ditempuh akan mendapat dukungan sepenuhnya dari perempuan apabila perempuan ikut dilibatkan di dalam upaya perdamaian tersebut. Pelibatan perempuan dalam proses perdamaian tersebut akan banyak memberikan masukan atau input yang sangat berarti. Dengan sangat optimisnya dia mengatakan bahwa perempuan akan dengan senang hati untuk bersinergi bersama membicarakan damai di Aceh. Perempuan juga sangat mengharapkan agar mereka juga dapat dilibatkan secara aktif dalam proses perdamaian tersebut.

Momentum perundingan ini harus disadari oleh berbagai pihak sebagai masa yang sangat diharapkan masyarakat menjadi awal terjadinya perdamaian di Aceh. Momentum dimana pihak yang terlibat dalam konflik sudah mulai memikirkan tentang bagaimana mencari jalan keluar. Waktu itu perempuan juga ikut terlibat, meski tidak langsung di dalam pelaksanaan, tapi perempuan memberi masukan-masukan berkenaan dengan bagaimana mengatasi kondisi di Aceh. Jeda kemanusiaan disadari belum dianggap sebagai wujud perdamaian, tapi paling tidak ini menjadi awal dimana perhatian-perhatian untuk mencari solusi damai itu sudah mulai ada.

Kondisi keamanan pada masa jeda kemanusiaan masih sangat menyulitkan pihak perempuan aktifis dalam bergerak. Ruangnya masih terbatas. Gerakan perempuan saat itu masih sangat berhati-hati. Salah melangkah bisa menjadi sasaran empuk dituduh sebagai aktor dari salah satu pihak, atau dianggap provokator. Aktifis perempuan saat itu lebih banyak beraktivitas mengumpulkan bantuan untuk disalurkan ke daerah-daerah di Aceh.

Perempuan yang belum lama menyepakati dalam Duek Pakat Inong Aceh untuk mendukung perdamaian merasa penting untuk terlibat dalam berbagai upaya damai termasuk jeda kemanusiaan. Perempuan tampil bersatu menyebut dirinya mendukung perdamaian. Momentum puncak deklarasi perdamaian tersebut ketika musyawarah proses-proses jeda kemanusiaan tahun 2000 dimana gerakan perempuan pro-perdamaian sudah bergeliat. MoU Helsinki tambahannya lagi, merupakan titik kulminasi suatu perjuangan panjang dalam merebut perdamaian yang abadi di Aceh. Sehingga semangat untuk berdamai yang menjadi inisiatif kaum perempuan tidak hilang begitu saja. Seolah-olah perdamaian ini hanya milik kaum laki-laki.

Menurut Samsidar, banyak sekali tokoh perempuan yang pada saat itu terlibat dan berkontribusi. Sehingga bila dituangkan dalam sejarah gerakan perempuan, maka penyebutan gerakan perempuan lebih relevan karena gerakan yang massif dari kelompok perempuan pada saat itu. Pesan yang muncul disini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa aktifis perempuan ini merupakan representasi dari mandat yang diberikan oleh perempuan Aceh pada saat DPIA, sehingga aktor/tokoh yang sesungguhnya adalah seluruh perempuan yang terlibat dalam berbagai proses pada saat itu.

Dikatakannya lagi ada upaya beberapa aktifis perempuan menemui dan meminta kepada Menteri Hukum HAM dan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI agar ada delegasi perempuan ikut serta dalam proses Jeda kemanusiaan. Ujung negosiasi pada akhirnya akhirnya dikabulkan dan perempuan terlibat dalam jeda kemanusiaan. Dengan adanya perempuan, paling tidak mereka dapat melihat, bagaimana realita konflik itu dan dampaknya terhadap perempuan. Saat itu memang sudah jelas terlihat upaya-upaya yang ditempuh untuk menuju perdamaian. Semua pihak berupaya mewujudkan perdamaian di Aceh.

Jeda kemanusiaan merupakan masa dimana perempuan harus terlibat di dalamnya dan sudah menjadi keputusan dari Duek Pakat. Momentum jeda kemanusiaan tidak boleh dilepaskan secara historis dari hasil rekomendasi DPIA yang menginginkan agar perempuan masuk ke berbagai meja perundingan. Aktifis perempuan Aceh bersepakat

sepakat untuk mewujudkan perdamaian di Aceh meskipun saat itu perjuangan belum berhasil, namun menjadi cikal bakal perdamaian di Aceh.

Jeda Kemanusiaan ini berlangsung sejak Juni s/d Agustus 2000, setelah berakhir masanya, program ini kemudian dievaluasi dan dilanjutkan kembali. Jeda Kemanusiaan yang semula diharapkan oleh banyak kalangan masyarakat bisa membantu menyelesaikan persoalan Aceh, ternyata dalam implementasi tidak efektif. Perwakilan kedua belah pihak dalam Tim tersebut ternyata hanya membicarakan kepentingan kedua belah pihak saja (tidak cukup jelas sejauh mana kepentingan masyarakat sipil menjadi komitmen keduanya). Sementara itu korban dari kalangan masyarakat sipil terus berjatuh. Usai masa jeda kemanusiaan yang kemudian dilanjutkan dengan Moratorium yang berlangsung selama tiga bulan, fakta keamanan selama sebulan dan akhirnya Damai Melalui Dialog (DMD) belum menghasilkan hal yang signifikan untuk penyelesaian kasus Aceh.

Tindak lanjut Jeda Kemanusiaan adalah menyusun format untuk perjanjian damai. Menurut Syarifah Rahmatillah, salah seorang pelaku yang terlibat dalam negosiasi damai, dikatakan bahwa dialog dalam damai merupakan tahapan dimana para pihak sudah mempunyai format penyelesaian konflik dan dalam dialog dalam damai inilah muncul inisiasi bantuan dana dari berbagai negara. Salah satu pertemuan yang digagas dalam dialog dalam damai adalah pertemuan di Tokyo. Perempuan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Syarifah Rahmatillah, sedangkan yang lainnya diantaranya Imam Syuja, Syaifuddin Banta Syam, Abdullah Puteh.

Keterlibatan Syarifah Rahmatillah pada pertemuan ini belum dapat dijelaskan apakah kehadiran Syarifah mewakili perempuan atautkah salah seorang tokoh yang kebetulan ditunjuk untuk hadir pada pertemuan tersebut. Syarifah sendiri belum dapat menjelaskan hal ini, tetapi menurut perkiraannya suara perempuan dalam perdamaian sudah dinyatakan dalam DPIA. Dan kemungkinan besar pertimbangan itu dijadikan alasan bahwa dalam perundingan damai pun perempuan harus diikutsertakan.

2.4 Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) Pada 9 Desember 2002

Antara pemerintah RI dan GAM dicapai sebuah kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities agreement) pada tanggal 9 desember 2002 di Jenewa, Swiss. Kesepakatan itu dimediasi oleh Henry Dunant Center (HDC), sebuah LSM Internasional yang juga berkedudukan di Swiss. HDC telah terlibat dalam penyelesaian konflik Aceh sejak Januari 2000 mulai dari Jeda Kemanusiaan (*the Moratorium Pause*), Damai Melalui Dialog sampai perjanjian penghentian permusuhan atau CoHA. Namun demikian hingga masa ini Pemerintah masih disinyalir menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi konflik yang terjadi di Aceh.

Selang sekitar 3 bulan paska CoHA merupakan masa yang mencekam, utamanya bagi aktifis-aktifis organisasi masyarakat sipil. Delegasi yang terlibat dalam Kuala Tripa satu per satu ditangkap. Berdasarkan penuturan aktifis yang pada saat itu mengalami, salah satu LSM yang mengusung isu perempuan yakni Kantor Mispi terancam akan dibakar.

Berkaitan dengan proses perdamaian, Rufriadi (*alm.*), seorang aktifis Aceh menyatakan dalam *factsheet* "Aceh Paska Konflik" bahwa perjanjian perdamaian tidak memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berperan. Padahal, di Aceh terdapat cukup banyak organisasi masyarakat yang melakukan perjuangan secara damai dan melakukan aksi-aksi untuk mencapai perdamaian di Aceh, baik dalam bentuk koalisi maupun forum. Beberapa yang tercatat antara lain, Balai Syura Ureung Inong Aceh (organisasi jaringan perempuan), organisasi mahasiswa seperti SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh), FARMIDIA (Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Islam di Aceh), SMIPA (Solidaritas Mahasiswa Islam Peduli Aceh), organisasi pelajar seperti SPUR (Solidaritas Pelajar untuk Rakyat), LSM seperti Walhi Aceh, Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, Kelompok Kerja Transformatif Gender (KKTG), Flower Aceh, Cordova, Yayasan Pembinaan Masyarakat Desa serta Forum Perempuan Aceh.

Berdasarkan beberapa pendapat aktor yang terlibat pada saat itu CoHA dikatakan tidak melibatkan kelompok perempuan. Padahal saat itu banyak organisasi perempuan yang sudah mempunyai concern pada kebijakan dan partisipasi politik perempuan seperti Mispi. RPUK sudah mulai muncul dalam rangka advokasi bagi korban perempuan dengan memberikan konseling dan bantuan hukum.

Meski kelompok perempuan tidak dilibatkan dalam proses CoHA namun pendekatan kepada para pihak tetap dilakukan sebagaimana komitmen mendorong perdamaian dalam DPIA. Kelompok perempuan terus-menerus mengurus korban, investigasi dan melakukan kampanye. Meski disayangkan dengan tidak ikut sertanya perempuan maka isu-isu korban, yang saat itu kebanyakan korban adalah perempuan, tidak dapat terangkat dalam perundingan tersebut. Kelompok perempuan tetap melakukan pengawalan CoHA dari luar, sekaligus menyusun kembali strategi yang dapat dilakukan oleh kelompok perempuan untuk mengaspirasikan keinginan kuat untuk berdamai.

Kalaupun ada proses untuk meminta keterlibatan perempuan sifatnya lebih pada pelibatan simbolik. Hal ini terungkap oleh salah seorang aktifis yang pernah ditawarkan untuk terlibat dalam CoHA. Dirinya diminta untuk mengikuti perundingan CoHA. Namun karena satu alasan yaitu pihak mengundang dirasa diskriminatif dan menyebut tidak banyak perempuan yang punya kapasitas, maka undangan tersebut tidak digubrisnya.

Di sisi lain, salah satu aktifis yang dalam DPIA pertama melakukan aksi WO menganggap penting bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam mendorong perdamaian. Dalam proses CoHA tersebut perempuan menjadi bagian dari team lobi, meski bukan mewakili organisasi perempuan atau kelompok perempuan. Kerja-kerja yang dilakukannya adalah melobi para pihak seperti GAM, TNI dan Polri untuk mengadakan pertemuan, kemudian mencari masukan. Hasil masukan tersebut ditujukan kepada kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan perdamaian. Pertemuan para pihak ini dimaksudkan untuk mencari solusi namun demikian perundingan tidak mencapai sasaran yang dikehendaki.

Bagian 3

Merajut Benang Merah Perdamaian

Seorang ibu di Kuala yang berusia 61 tahun, kehilangan 49 anggota keluarganya, yang terdiri dari adik, kakak, beserta anak-anak mereka. Dia juga kehilangan enam dari sembilan anak kandungnya beserta cucu-cucunya, dan kehilangan suaminya sendiri. Sekarang ia menumpang pada salah satu anaknya yang masih hidup di Ulee Kareng.

Cerita lainnya, seorang ibu muda, 30-an tahun, setiap hari datang ke Aso Nanggroe, sebuah desa di dekat Pelabuhan Ulee Lhee. Bersama anak perempuannya yang berumur tujuh tahun, setiap hari ia duduk di atas puing-puing rumahnya yang tersisa. Matanya menatap jauh dengan penuh kelelahan, tanpa air mata, tanpa harapan. Dia tidak menangis lagi karena kekuatan untuk menangis sudah tidak ada. Dia hanya menyesali nasibnya karena satu hari sebelum Tsunami, ia menginap di rumah mertuanya di daerah Seulimun. Tsunami telah membawa suami, ibu, bapak, adik-adik, dan dua anaknya pergi untuk selama-lamanya.

Dia menyesali mengapa dia tidak bersama mereka pada hari itu, mengapa ia harus meninggalkan mereka dan membiarkan mereka meninggal. Setiap hari dia datang dari Seulimum untuk beberapa jam duduk di puing-puing bekas rumah keluarganya, untuk menenteramkan hati dan mendapatkan kekuatan menjalani kehidupannya kini, tanpa ada keluarga.

***Dikisahkan oleh Irwan Adullah,
Center for Religion and Culture Studies (CRCS)***

Tsunami merupakan bagian tersendiri dalam sejarah di Aceh di samping Konflik. Keduanya baik tsunami maupun konflik, menelan korban manusia dan harta benda. Tsunami tidak dapat dielakkan karena merupakan urusan dari Yang Maha Kuasa, sedangkan konflik selalu berasal dari manusia. Manusia yang membuat konflik terjadi dan hanya manusia pula yang bisa mengakhirinya. Aceh sekali lagi menjadi contoh atau bisa dijadikan bukti sejarah akan kebesaran Ilahi, dimana ditunjukkan betapa manusia pada akhirnya kalah di hadapan Sang Pencipta. Allah SWT telah mengetuk pintu hati, pendengaran dan penglihatan manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi dan saling berdamai. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdamaian lahir pada masa *emergency response* dimana masyarakat di Aceh membutuhkan pertolongan baik perumahan, pangan dan obat-obatan.

Jauh sebelum tsunami, rakyat Aceh telah lama menderita dalam konflik yang berkepanjangan. Masyarakat telah lama menderita dan terjebak di tengah baku-konflik TNI dan GAM. Pada masa ini perempuanlah yang paling banyak merasakan penderitaan baik fisik maupun mental. Mereka terjepit di tengah *cross-fire*, baik dalam makna simbolis maupun harafiah. Bahkan ada banyak cerita yang bisa menunjukkan betapa mereka terjebak di tengah konflik segitiga: GAM, TNI dan Polisi (Brimob). Aceh sangat merindukan agar anak-anak bisa sekolah secara tenteram, orang tua bisa membesarkan anak mereka secara bermartabat, ayah-ibu bisa bekerja tanpa intimidasi, ulama, dokter,

guru dan birokrat bisa leluasa melayani masyarakat, dan agar bisnis berjalan. Tragedi tsunami yang kolosal menjadi momentum besar bagi rakyat Indonesia dalam melihat Aceh, untuk menghadirkan PERDAMAIAN yang lama telah dirindukan rakyat Aceh.

3.1 Inisiator Damai Yang Terlupakan

Sejak penandatanganan MoU Helsinki pada Agustus 2005, kemajuan dalam hal perdamaian menempuh perkembangan yang cukup menakjubkan. Relasi kedua belah pihak semakin menunjukkan kesungguhannya dalam mengawal MoU Helsinki. Sayangnya peran perempuan dalam MoU Helsinki sangat minim. Kalaupun dikatakan ada, peranan perempuan tidak berkontribusi secara langsung terhadap hasil yang telah dicapai. Syarifah Rahmatillah mengatakan meskipun kontribusi perempuan minim ketika MoU Helsinki tetapi perempuan di Aceh telah meletakkan dasar-dasar perdamaian jauh sebelum penandatanganan damai. Perempuan yang memperkenalkan bahwa dialog merupakan cara yang efektif untuk memulai perundingan damai. Ini ditunjukkan dengan kerja-kerja para aktifis perempuan dalam mengemban mandat DPIA.

Perkembangan perdamaian melalui Aceh Monitoring Mission (AMM) di Aceh telah sukses mengawasi pemusnahan senjata-senjata GAM dan penarikan pasukan kepolisian dan militer dari Aceh. Pada tanggal 21 Desember 2005, GAM menyerahkan 142 terakhir senjata yang dimilikinya, yang pada akhirnya melengkapi total dari 840 buah yang diwajibkan MoU. Pada 31 Desember 2005, diadakan upacara penarikan kembali 7.628 tentara dan 2.150 polisi, yang menjadikan total prajurit yang telah ditarik menjadi 31.681.1 Pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA), sebagai bagian dari pelaksanaan pasal-pasal di MoU.

Sekali dikatakan bahwa pelibatan perempuan sangat minim baik dalam proses penandatanganan damai, pelucutan senjata, penarikan pasukan hingga masa reintegrasi. Bila ditilik dari sisi fasilitator perdamaian yaitu CMI, terlihat bahwa CMI menggunakan format pendekatan yang berbeda dengan format yang pernah dijalankan HDC. Namun demikian, perlu juga diterima bahwa format pendekatan ketika MoU Helsinki merupakan *learning process* dari proses-proses perundingan damai sebelumnya.

Bagi aktifis perempuan MoU Helsinki merupakan capaian dari perjuangan perempuan sejak DPIA pertama. Ini pertanda bahwa ikatan belenggu konflik sudah terlepas, sekaligus menjadi awal bagi Aceh untuk membangun kehidupan yang sudah hancur ke arah yang lebih baik. Meski demikian terburai dalam benak para aktifis mengapa secara eksplisit butir-butir MoU tidak menyebutkan hak-hak perempuan. Pertanyaan itu tetap tersimpan dan secara positif ada yang mengatakan bahwa momentum ini merupakan peluang agar perempuan bisa lebih maju.

Pelibatan perempuan dalam MoU Helsinki tidak secara tegas ada. Seorang aktifis perempuan beranggapan bahwa perempuan tidak dilibatkan secara langsung dalam MoU Helsinki. Ini ditandai oleh tidak adanya secara formal organisasi perempuan diundang dalam perundingan tersebut. Meskipun demikian, ada pelibatan secara personal beberapa aktifis perempuan terlibat dalam perundingan ini. Tidak terlibatnya organisasi perempuan dalam perundingan ini, bukan berarti gerakan mendorong perdamaian

berhenti. Para aktifis perempuan terus menerus mengawal dan mendorong para pihak untuk mengkonkretkan perdamaian di Aceh.

Ruang demokrasi dalam MoU Helsinki sangat terbuka lebar. Dan hal ini menguntungkan bagi kepentingan pergerakan perempuan. Ditandai dengan terlaksananya pilkada, disusul kemudian dengan diakuinya partai lokal menjadi bagian dari peserta dalam pemilu. Dan syarat mendirikan partai lokal adalah mengikutsertakan minimal 30%. Ini sesuai dengan mandat yang dicetuskan pada tahun 2000 bahwa perempuan harus terlibat dalam urusan politik dengan mendorong 30% kuota bagi perempuan.

Hasil dari MoU Helsinki juga menggembirakan dimana keamanan sudah semakin membaik sehingga memungkinkan melakukan kegiatan secara leluasa. Sikap was-was sebagai aktifis yang dulunya sering mendapat dan dibayang-bayangi ancaman sudah hilang. Satu hal yang sangat meyakinkan adalah dengan dilakukannya pelucutan dan pemotongan senjata sebagai pertanda tidak ada lagi pertempuran antara kedua belah pihak.

MoU jelas merupakan suatu momentum yang ditunggu-tunggu, terutama perempuan. Masyarakat sudah capek berkonflik. Apa yang selanjutnya dilakukan perempuan dalam menyikapi MoU Helsinki? Beberapa aktifis berpendapat, perempuan mulai bergerak mengkritisi butir-butir MoU dan berusaha untuk mengawal butir-butir kesepakatannya. Diyakini bahwa implementasi atas butir-butir MoU akan secepatnya menjadikan perdamaian yang sesungguhnya terjadi, tidak seperti perundingan-perundingan sebelumnya.

Dari sisi lain, perundingan MoU Helsinki juga menunjukkan bukti kealfaan pihak laki-laki dalam mengajak perempuan ikut serta. Dimana sesungguhnya, isu perdamaian telah lama dinantikan dan didorong agar terwujud pada setiap tahap perundingan, namun pada momentum puncak justru perempuan tidak terlibat. Hal ini disayangkan oleh para aktifis perempuan. Namun semangat untuk mengawal MoU agar tetap konsisten tetap dilakukan oleh kelompok perempuan.

3.2 Pelucutan Senjata dan Proses Reintegrasi

Momentum pelucutan senjata menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah memberikan toleransi yang luar biasa untuk meninggalkan konflik dan bergerak menuju masa depan yang damai. Momentum pelucutan senjata sepertinya menanamkan ketakutan, meski pada kenyataannya ada perasaan lega. Pelucutan senjata bagaikan hancurnya sebuah momok yang menakutkan. Bagi aktifis perempuan, mereka mendapat seolah mendapat jaminan bahwa damai akan terus ada. Apalagi disaksikan bahwa senjata telah dipotong-potong. Harapan yang kuat bagi aktifis perempuan dan mungkin seluruh masyarakat Aceh agar senjata ilegal tidak ada lagi di Aceh.

Pelucutan senjata merupakan rangkaian awal implementasi MoU dimana setelah itu dilakukan penarikan pasukan sebagai tanda proses kontak senjata tidak terjadi lagi di Aceh. Momentum ini sangat menggembirakan semua pihak di Aceh dan menunjukkan bukti bahwa GAM dan Pemerintah RI sudah berkehendak untuk berdamai. Setelah melalui pelucutan senjata dan penarikan pasukan maka proses selanjutnya adalah

mengembalikan mantan kombatan ke dalam masyarakat, dalam MoU proses ini disebut dengan reintegrasi.

Proses reintegrasi merupakan bagian dari proses peace building. Reintegrasi juga merupakan masa transisi yang menentukan apakah perdamaian dapat berlangsung permanen ataukah perdamaian semu. Masa reintegrasi ini bisa menjadi peluang yang sangat besar bagi perjuangan perempuan menggulirkan gagasan-gagasan yang telah dirintis sejak DPIA, dan sekaligus mendorong proses-proses penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan di masa konflik. Dalam agenda reintegrasi masih banyak hal yang belum dilaksanakan, misalnya korban konflik yang masih banyak mendapatkan keadilan. Dana reintegrasi, bantuan sosial, dan bantuan lainnya belum terlaksana dengan baik.

Meskipun konsolidasi gerakan perempuan boleh dibilang berjalan baik, namun sifat konsolidasi ini masih semu. Rasa curiga akibat peristiwa yang terjadi pada masa konflik masih membekas dan belum pulih sepenuhnya. Walaupun harus diakui sudah ada banyak yang berubah. Organisasi perempuan pada masa reintegrasi ini sudah bertambah dengan pekerjaan yang cukup banyak. Pendampingan korban, pengorganisasian kelompok komunitas perempuan, hingga advokasi hak-hak perempuan dalam arena politik dan ekonomi gencar dilakukan.

Sibuknya kelompok perempuan pada masa ini, lebih banyak didukung oleh faktor banyaknya bantuan tsunami di Aceh. Oleh beberapa aktifis, masa ini dirasakan sebagai masa-masa kemunduran konsolidasi gerakan perempuan. Padahal seharusnya justru pada masa dimana tekanan terhadap aktifitas gerakan semakin berkurang, konsolidasi lebih mudah dilakukan. Pada kenyataannya tidak demikian, banyak jaringan yang dulunya digunakan sebagai kendaraan konsolidasi pada akhirnya kurang efektif lagi.

Tercetus dari salah seorang aktifis perempuan yang juga ikut dalam DPIA pertama, bahwa dalam tahap reintegrasi seharusnya platform gerakan perempuan mulai dibicarakan kembali. Persoalan perbedaan pendapat di masa lalu dapat segera diselesaikan dan melangkah pada pemenuhan beberapa cita-cita gerakan perempuan yang masih belum tercapai. Reintegrasi hanyalah kulit dari buah perdamaian, bisa dirasakan hasilnya jika proses reintegrasi sudah dilalui. Banyak agenda gerakan perempuan yang dapat juga sekaligus dikerjakan seperti dalam aspek ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya.

Gerakan perempuan sekarang ini ingin membebaskan perempuan dari berbagai ketertinggalan mereka, misalnya kesehatan ibu, pendidikan anak. Sekarang tingkat kematian ibu di Aceh masih cukup tinggi. Ini mestinya harus mendapat perhatian. Kemudian perempuan dalam politik, ternyata dari struktur pemerintah Aceh sangat sedikit perempuannya. Ini menjadi ruang bagi gerakan perempuan untuk mendorong agar pemilu 2009 dan kedepannya lagi perempuan dapat lebih maju.

Kalau dilihat kondisi pada masa ini, memang bisa dikatakan gerakan perempuan belum sepenuhnya memberi dampak yang banyak terhadap kemajuan perempuan, padahal perjuangan untuk meraih cita-cita itu panjang dan melelahkan. Dalam hal Pemilu 2009,

keterlibatan perempuan dalam KIP sangat sedikit. Ada daerah yang anggotanya tidak ada perempuan. Dengan minimnya perempuan, harapan besarnya jika laki-laki yang duduk di KIP mempunyai perspektif yang baik tentang gender. Gerakan perempuan dari dulu hingga sekarang telah memberikan pengaruh yang besar bagi Aceh. Paling tidak sekarang orang mengakui bahwa perempuan sudah banyak berbuat.

Dari berita yang diterbitkan Aceh Kita pada 13 Juni 2006 dilansir berita untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan reintegrasi, sejumlah aktifis perempuan mendeklarasikan berdirinya Liga Inong Aceh (LINA) di Banda Aceh. Selain para aktifis, sejumlah mantan pasukan perempuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) divisi *Inong balee* juga terlibat dalam LINA. Dalam deklarasi di sebuah restoran di Banda Aceh itu, hadir sejumlah bekas kombatan *Inong balee*, mahasiswi, aktifis perempuan, dan unsur Aceh Monitoring Mission (AMM).

Ketua LINA mengatakan, “selama ini, para perempuan Aceh terpinggirkan. Begitu juga dengan nasib para pasukan *Inong balee*. Padahal, perempuan Aceh dan *Inong balee* juga menjadi korban dalam konflik yang berkepanjangan”. Tambahnya lagi, “sekarang tidak banyak yang memikirkan nasib mereka, bahkan bisa dibilang belum ada.” Perempuan dan *Inong balee* yang lama terlibat dalam konflik ini, bisa menyalurkan aspirasinya melalui LINA. LINA didirikan untuk memberdayakan kesadaran politik perempuan Aceh yang tinggal di pedesaan, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan politik.

Jika kesadaran politik perempuan Aceh sudah tinggi diharapkan mereka bisa kembali bangkit dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Aceh di masa yang akan datang. Perempuan Aceh nantinya bisa menjadi seorang konseptor dan perumus undang-undang, pengambil kebijakan, dan bahkan negosiator. LINA menjalankan program-program yang telah dipersiapkan, seperti training politik bagi perempuan.

Bagi MISPI, menurut Syarifah Rahmatillah, sejak berdirinya tahun tetap konsisten dalam mengawal penguatan perempuan legislatif. Perempuan diharapkan dapat menjadi leader dalam pengambilan keputusan di Aceh. Antara tahun 2006 hingga 2008 telah banyak aktivitas yang dilakukan oleh MISPI dalam rangka memberdayakan dan memberikan pengetahuan tentang legislatif. MISPI juga mempunyai sarana lingkaran belajar berbentuk komunitas majelis ta'lim yang merupakan wahana dialog antar perempuan. Wahana majelis ta'lim ini merupakan jawaban atas kesulitan perempuan untuk bertemu dan berdiskusi. Sebagai pembanding, laki-laki di Aceh mempunyai ruang yang cukup luas untuk melakukan pertemuan dan mendiskusikan isu-isu terkini. Sementara perempuan mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan ruang-ruang berkumpul tersebut. Oleh karenanya majelis ta'lim selain sebagai sarana memperdalam pengetahuan agama juga memperdalam pengetahuan perempuan terhadap konteks politik terkini.

Flower Aceh juga merupakan organisasi yang cukup lama kiprahnya yakni sejak masa DOM. Ketekunannya menggarap isu kekerasan terhadap perempuan membuat Flower terkenal dengan LSM perempuan yang membela hak-hak perempuan. Flower dipimpin oleh Suraiya Kamaruzzaman, seorang aktifis yang sudah gencar menyuarakan hak-hak

perempuan sejak di bangku kuliah. Saat ini Flower masih mengawal isu perempuan dan salah satu organisasi perempuan yang cukup besar di provinsi Aceh.

LINA, MISPI dan Flower Aceh merupakan contoh dari beberapa LSM perempuan pada masa perdamaian seperti Lembaga Kajian Bantuan Hukum Wanita dan Keluarga (LKBHWK), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan masih banyak lainnya. Pada umumnya organisasi-organisasi ini bergerak cukup maju dalam hal manajemen organisasi dan substansi yang diusung masing-masing.

Berbeda dengan perkembangan organisasi jaringan seperti KKTGA, pada tahun 2006-2007 mengalami krisis konsolidasi gerakan yang luar biasa. Organisasi jaringan ini seolah seperti kompetitor bagi anggotanya. Hal ini disebabkan adanya persoalan dari dalam sendiri maupun anggota. Kiprah KKTGA mengalami kegamangan ketika memilih untuk menjalankan fungsi sekretariat atau lembaga pelaksana program ansih. Namun demikian persoalan dalam tubuh organisasi pada akhirnya dapat teratasi dan perlahan ruang konsolidasi semakin lama semakin baik.

Balai Syura Ureng Inong Aceh juga merupakan organisasi jaringan. BSUIA mengemban mandat DPIA untuk mengawal perdamaian dan mendorong partisipasi seluas-luasnya bagi perempuan dalam konteks pengambilan keputusan negara. Penjelasan BSUI ini telah cukup banyak diulas dalam buku ini, yaitu sebagai organisasi jaringan perempuan yang cukup besar di provinsi Aceh.

3.3 Kontribusi Perempuan Aceh dalam Perumusan UU PA

"Gerakan perempuan di Aceh belum dapat dikatakan berhasil membawa nasib perempuan lebih baik. Namun paling tidak gerakan perempuan Aceh telah berhasil memasukkan pengakuan dan penegakan hak asasi perempuan dalam UU Pemerintah Aceh".

Pada Desember 2005 terbentuk sebuah aliansi bersama organisasi perempuan di Aceh yang disebut dengan Jaringan Perempuan untuk Kebijakan (JPuK). Jaringan ini dibentuk oleh 26 organisasi perempuan di Aceh dengan tujuan mengawal proses penyusunan RUU PA tidak saja pada substansi yang berpihak pada perempuan tetapi berbicara juga tentang konteks kewenangan, politik lokal dan perdamaian di Aceh. Upaya-upaya yang ditempuh oleh JPuK adalah mendiskusikan muatan apa saja yang akan masuk dalam RUU PA, mensinergikan muatan-muatan tersebut dengan Jaringan Demokrasi Aceh (JDA), mencari tahu lebih dalam lagi kebutuhan perempuan dari 26 inisiator awal dan juga organisasi perempuan lainnya. Disepakati pada saat ini Mitra Sejati (Mispi) sebagai pengelola sekretariat JPuK.

Kerjasama JDA dan JPuK dalam gerakan mengawal RUU PA menghasilkan suatu gerakan pengawalan advokasi yang massif. JDA sangat membutuhkan JPuK dalam beberapa hal seperti menegosiasikan substansi yang berkaitan dengan perempuan, menyampaikan aspirasi perempuan tentang tata pemerintahan Aceh, mensinergikan pertemuan-pertemuan organisasi perempuan baik di Aceh maupun Jakarta dan menggaungkan wacana yang terkandung dalam RUU PA serta upaya menjaga perdamaian baik kepada media massa maupun masyarakat pada umumnya.

Ditinjau dari sisi gerakan perempuan JPuK bukanlah gerakan perempuan Aceh yang sama sekali baru, meski nama gerakan yang dibangun menggunakan nama jaringan baru. Organisasi-organisasi yang tergabung dan juga individu yang mendukungnya merupakan satu rangkaian dengan gerakan perempuan pada saat DPIA I. Beberapa perundingan damai seperti jeda kemanusiaan dan dialog dalam damai juga mengikutsertakan organisasi dan individu yang terlibat dalam DPIA I. Secara resmi hasil-hasil DPIA I dimandatkan kepada Balai Syura Inong Aceh, namun dalam implementasinya dikerjakan bersama-sama organisasi perempuan pendukungnya seperti Mispi, Flower Aceh, KKTGA, dan pendukung individu dan organisasi yang cukup banyak dan tidak disebut satu per satu.

Seperti disebutkan sebelumnya DPIA II banyak berbicara mengenai sikap dan perhatian perempuan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Meski demikian, momentum DPIA II merupakan ajang konsolidasi kembali perempuan dalam membicarakan dan menyikapi konteks penyelenggaraan pemerintahan di masa paska tsunami. Hal ini juga yang kemudian berkontribusi utama dalam terbentuknya JPuK pada 6 bulan setelah DPIA II.

JPuK menyumbang kontribusi yang besar dalam draft yang disusun sebagai draft RUU versi Rakyat Aceh. Gagasan yang diusung oleh JPuK merupakan yang sudah didiskusikan pada tahun 2000 ketika DPIA I. Sehingga ketika JPuK berbicara mengenai beberapa gagasan yang tertuang dalam naskah RUU PA, tidak terjadi resistensi dari kelompok perempuan di Aceh. Justru gagasan ini merupakan kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi dan RUU PA menjadi peluang untuk memasukkan agenda-agenda tersebut. Beberapa gagasan yang didorong dan diperjuangkan oleh JPuK dalam naskah RUU PA ini antara lain:

Masalah partai politik local: “partai politik local didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan sekurang-kurangnya 30% perempuan dan sudah berdomisili tetap di Aceh” (Pasal 65, ayat 2); “Kepengurusan partai politik lokal terdiri dari atas sekurang-kurangnya 30% perempuan” (pasal 65, ayat 6).

Masalah perekonomian: “Usaha-usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi yang dilakukan oleh kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja” (pasal 128 ayat 3).

Masalah pendidikan: “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” (pasal 168 ayat 2).

Masalah kesehatan: “Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota memberikan peluang kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi social, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta

dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk berperan dalam bidang kesehatan.” (pasal 180 ayat 4).

Masalah Hak Asasi Manusia: “Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang bermartabat.” (Pasal 186, ayat 1). “Pemajuan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak perempuan dan anak yang disebut pada ayat (1) masing-masing diatur lebih lanjut di dalam Qanun Aceh.” (Pasal 186 ayat 2).

Bila lihat kembali kelima point yang menjadi perhatian JPuK ini semuanya mengacu pada point kesepakatan yang telah dibangun pada DPIA I. Hasil DPIA I sebenarnya lebih besar dari kelima point tersebut, karena semangat yang dibangun dalam mengawal RUU PA adalah pembagian peran, maka kelima butir ini disepakati menjadi perhatian JPuK.

Syariat Islam sebenarnya lebih kepada tanggung jawab pihak MPU dalam merumuskan dan mengawal substansinya tetapi dalam hal ini perempuan juga terlibat dalam mengawal meski terjadi perdebatan. Perdebatan tersebut tidak muncul pada publik dan hanya terjadi di dalam gerakan advokasi RUU PA. Substansi yang dipersoalkan menyangkut penerapan syariat Islam yang cenderung merugikan kaum perempuan. Beberapa pihak yang berkepentingan seperti MPU, DPRA, akademisi dan juga organisasi perempuan bertemu dan menghasilkan pemahaman yang baik mengenai penerapan Syariat Islam. Untuk kemudian keberatan kaum perempuan terhadap substansi syariat Islam tidak muncul lagi di kemudian hari.

Kuota 30% ini merupakan salah satu butir kesepakatan pada saat DPIA I yang dirumuskan oleh Komisi B Bidang Politik. Rekomendasi lain yang dihasilkan pada saat DPIA seperti penegakan HAM, masuk ke dalam RUU PA meski upaya ini dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak lain seperti JDA, DPRA, GAM dan komponen masyarakat Aceh lainnya. Sementara mengenai point rekomendasi mengenai menciptakan rasa aman dan damai dan menyejajarkan gencatan senjata sudah terwujud sebagai tindak lanjut MoU Helsinki.

Usulan membuka akses dan pendanaan seluas-luasnya dalam perekonomian di Aceh merupakan agenda perempuan sejak DPIA I. Bahkan beberapa point perekonomian dalam DPIA tidak hanya menyangkut pemberdayaan perempuan saja tetapi upaya perempuan dalam mendorong perubahan perekonomian secara umum. Sebagai contoh, perempuan perlu mendorong upaya-upaya dalam memasyarakatkan ekonomi rakyat yang Islami, mendorong kerjasama pemerintah dan LSM untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan menolak diskriminasi upah minimum regional (UMR) bagi perempuan. Sayangnya, beberapa gagasan ini tidak sepenuhnya masuk substansi RUU PA.

Dapat dikatakan bahwa JPuK tidak hanya mengawal kelima point di atas, karena sesungguhnya mandate dari DPIA I lebih besar dari itu. Seperti disebut di atas mengenai syariat Islam bukan ranah perhatian perempuan tetapi juga didiskusikan dengan pihak yang berkepentingan utama. Soal lain mengenai perimbangan keuangan dimana hal inipun menjadi salah satu rekomendasi dari DPIA I. Hal lain lagi seperti perempuan

pekerja *migrant* yang juga dititipkan pada substansi tenaga kerja, meski tidak spesifik yang diharapkan oleh perempuan Aceh seperti adanya perlindungan bagi perempuan pekerja *migrant*.

Melihat alir gerakan perempuan, konsolidasi gerakan perempuan telah terjadi antara kelompok pro dan kontra referendum pada saat pengawalan RUU PA. Konsolidasi di sini bukan diartikan sebagai konsolidasi fisik tetapi konsolidasi dalam makna mendorong gagasan yang sama yaitu perempuan harus terlibat dalam arena penyelenggaraan negara.

JPuK bekerja pada dua ranah baik di Aceh maupun Jakarta. Di Aceh peran JPuK mengkonsolidasikan substansi bersama-sama 26 organisasi inisiator dan memperluas konsolidasinya kepada organisasi lainnya. JPuK melakukan pertemuan-pertemuan reguler dan menyepakati untuk mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengawal RUU PA. Dalam melaksanakan kegiatannya JPuK banyak melibatkan perempuan dari berbagai kalangan baik dari LSM, pemerintah, legislatif maupun akademisi.

Sebagai langkah awal konsolidasi ke Jakarta, dilakukan kunjungan ke Komnas Perempuan dimana JPuK berusaha menjelaskan maksudnya dan ingin meminta dukungan dari Komnas Perempuan. Kemudian, JPuK juga melakukan inisiatif mengkonsolidasikan dengan Kaukus Perempuan Parlemen yang dikoordinasi oleh Nursyahbani Katjasungkana (FKB). Selanjutnya, melakukan koordinasi intensif dengan salah satunya Kalyanamitra yang cukup aktif terlibat dalam mengawal RUU PA untuk mengawal substansi perempuan.

Dengan dukungan dari donatur yang dikoordinasikan oleh Yappika pada saat itu, JPuK selalu memantau setiap momentum yang berkaitan dengan substansi RUU PA. Momentum tersebut diantaranya pada saat pembahasan di DPR RI baik bersifat formal (persidangan) maupun menjadi tim perumus yang dititipkan pada masing-masing fraksi. JPuK juga hadir pada saat melakukan pers conference baik momentum bersama-sama JDA, juga momentum yang dilakukan secara khusus.

Selain itu, relasi dengan internasional pun juga dilakukan dengan melakukan upaya lobi baik dilakukan secara roadshow maupun dalam pertemuan donor. Membangun relasi dengan internasional dilakukan dengan maksud mendapatkan dukungan dari internasional terhadap agenda-agenda yang diusung perempuan. Asumsi pada saat itu adalah agenda internasional masih mewarnai agenda politik nasional sehingga diharapkan ada upaya dari internasional untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah mengenai pemihakan terhadap posisi kaum perempuan. Di samping itu sharing informasi ini membantu pihak internasional menggulirkan gagasan yang tepat untuk melakukan program pembangunan khususnya kepada Aceh.

Bagian 4

Mengisi Pembangunan dengan Perdamaian

4.1 Duek Pakat Inong Aceh (DPIA-II) Tahun 2005

Konflik yang belum kunjung usai ditambah lagi dengan bencana alam gempa dan tsunami, membuat perempuan masih dalam posisi korban baik langsung maupun tidak langsung. Perempuan seperti korban hidup yang terus-menerus menjadi objek dari berbagai kepentingan dan kebijakan. Gagasan pembaharu dari perempuan tenggelam oleh hiruk pikuknya persoalan Aceh yang besar dan sangat rentan didominasi oleh kaum laki-laki.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan disadari terdapat nilai positif bagi pemulihan sosial tetapi disisi lain hal ini dapat menimbulkan efek negatif bila proses ini tidak dilakukan secara partisipatif atau melibatkan perempuan dalam proses implementasinya. Maka perempuan mengambil inisiatif untuk menyatukan pandangan dan berkeinginan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dengan latar belakang tersebut Balai Syura Ureung Inong Aceh selaku organisasi yang direkomendasikan oleh Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) I perlu segera melaksanakan DPIA II. Hal ini penting dan mendesak mengingat pelaksanaan DPIA II adalah sebuah rumah bagi perempuan Aceh untuk menggalang kekuatan dan inisiatif, saling bertukar informasi dan pengalaman, saling memberi inspirasi dan kekuatan di tengah peminggirannya sebagai manusia dan warga negara. Dilaksanakan pada 15-28 Juni 2005 dengan tema "*Beudoh Beusare Inong Aceh, Peurapat Langkah Menuju Baldatun Thoiyibatun Warabbun Ghafur*". Peserta terdiri dari unsur Ulama, Akademisi, NGO, Legislatif, Pengungsi/korban, Eksekutif / Birokrasi / Pemerintahan, Ormas, Guru, Profesi (Pengacara, Paramedis, Pengusaha, Notaris, Journalis), Golongan Minoritas (Etnis Tionghoa, Non Muslim), Ibu Rumah Tangga, Petani / Nelayan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Mahasiswa / Organisasi Kepemudaan.

Adapun tujuan diselenggarakannya DPIA II ini sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman, penyadaran dan pendidikan tentang pentingnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses recovery dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Mengidentifikasi persoalan-persoalan dan kebutuhan perempuan Aceh menuju rekonstruksi Aceh yang berkeadilan
3. Mempertegas peran, posisi dan fungsi perempuan Aceh sebagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial bagi masa depan Aceh yang lebih bermartabat
4. Menggalang kekuatan dan potensi perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam, tanpa dibedakan oleh suku, agama, pendidikan, kedudukan dan tingkat ekonomi
5. Menggalang kekuatan dan potensi perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam, tanpa dibedakan oleh suku, agama, pendidikan, kedudukan dan tingkat ekonomi

Situasi pada saat ini sudah sangat berbeda. Saat itu kondisi Aceh baru saja dilanda tsunami, dan dirasakan gerakan perempuan mulai bangkit kembali. Semangat gerakan DPIA pertama muncul kembali. Namun kali ini bangkitnya gerakan perempuan melihat

kenyataan besarnya penderitaan yang dialami rakyat Aceh setelah musibah tsunami. Beberapa aktifis menginisiasi kembali pertemuan bagi perempuan di Aceh yang kemudian disebut dengan DPIA II (Duek Pakat Inoeng Aceh Kedua). Saat itu para aktifis perempuan yang selamat dari musibah tsunami kembali bergerak. Selanjutnya gerakan ini banyak mendapat dukungan dari aktifis luar Aceh yang ikut membantu membenahi gerakan perempuan di Aceh saat itu.

Kongres perempuan kedua itu antara lain menyikapi masalah pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Utamanya melihat imbasnya bagi perempuan yang kemudian menjadi objek dari pemberlakuan syariat Islam. Selain itu dirasakan juga bahwa kongres kedua itu juga menyikapi masalah yang sangat kompleks di Aceh. perdamaian belum tercapai, kemudian ada tsunami, dan penerapan syariat Islam.

DPIA II ini dinilai cukup sukses dari sisi penyelenggaraannya. Meski demikian perdebatan di tingkat konsolidasi perempuan belum selesai. Wadah konsolidasi yang diharapkan terjadi dalam DPIA II belum sepenuhnya tercapai. Namun demikian, upaya konsolidasi gerakan perempuan harus tetap diselenggarakan dibuka secara demokratis. Pada kenyataannya, menurut beberapa pengakuan dari beberapa aktifis mereka tetap datang meski tidak diundang. Beberapa aktifis ini sebagiannya adalah para aktifis perempuan yang WO pada DPIA I. Namun sayang sekali, suasana traumatik masa lalu masih membekas sehingga suasana dalam forum belum terasa cair.

Presidium DPIA II Samsidar menganggap nuansa DPIA II berbeda, kualitasnya jauh berbeda dibandingkan DPIA I pada tahun 2000. DPIA II lebih banyak berbicara soal rehabilitasi dan rekonstruksi, pendekatan yang digunakannya pun sangat netral gender. Meski menyinggung soal perdamaian, tapi tidak seperti dialektika yang terjadi pada tahun 2000. Kemudian ada juga pembicaraan soal syariat Islam, yang menurut pandangan salah seorang aktifis perempuan masih sangat dangkal, kemudian itu menjadi debat kusir.

Presidium DPIA II mengatakan bahwa sebagian orang yang terlibat pada kongres kedua adalah mereka yang di kongres pertama. Namun beberapa peserta tahun 2000 ternyata tidak diundang lagi. Dalam DPIA II terbukti bahwa organisasi perempuan di Aceh semakin banyak dibandingkan DPIA I. Salah seorang pelaksana DPIA II mengatakan amanah duek pakat harus dilakukan lima tahun sekali dan sebelumnya diawali dengan konsultatif meeting. Balai Syura sebenarnya adalah organ untuk menindak lanjuti hasil duek pakat inoeng Aceh I. Agenda Duek pakat itu tujuannya meneruskan perjuangan perempuan yang belum usai. Disitu dilakukan evaluasi apa yang telah dilakukan dalam konteks gerakan dan apa yang akan dilakukan kedepan.

Dibalik komentar internal terhadap kegiatan DPIA II, kegiatan ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari Serambi Indonesia, selama tiga hari berturut-turut 16-18 Juni 2005 menayangkan berita mengenai DPIA. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 850 orang, kurang lebih 350 orang diantaranya berasal dari tokoh perempuan Aceh serantau. Dikatakan dalam media Serambi DPIA menjadi ajang unjuk gigi, bahwa perempuan masih tetap eksis dan berbuat sesuatu. "Baldatun Thaibatun Warrabun Ghafur", bukanlah

sekedar semboyan tapi menjadi spirit bahwa perempuan dapat menjadi subyek pembangunan yang bermartabat dan manusiawi.

4.2 Perempuan Dalam Reintegrasi di Aceh

"Akses kaum perempuan dalam menyuarakan suara hatinya yaitu terwujudnya perdamaian Aceh yang permanen, masih jauh dari yang diharapkan."

*Syarifah Rahmatillah
Direktur Eksekutif MISPI⁴*

MoU Helsinki merupakan wujud konkret kesungguhan kedua belah pihak yang berkonflik untuk berdamai. Setelah dua fase utama dilalui seperti penarikan pasukan non-organik dan juga pelucutan/pemotongan senjata, fase berikutnya adalah reintegrasi. Reintegrasi bermakna pembauran kembali mantan kombatan GAM kembali ke dalam masyarakat. Basis reintegrasi ini tertuang dalam MoU Helsinki butir ke 3.2. Sayangnya dalam MoU Helsinki termasuk dalam butir 3.2 Reintegrasi ke Dalam Masyarakat, tidak secara khusus menyebutkan perempuan sebagai penerima manfaat. Inilah hal yang kemudian menjadi sorotan para aktifis gender dalam mempertanyakan sejauh mana perempuan mendapat manfaat dalam proses reintegrasi.

Reintegrasi berperspektif gender mensyaratkan adanya akses, kemanfaatan dan kontrol perempuan terhadap implementasi reintegrasi. Seperti dikatakan sebelumnya, ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan sangat minim baik Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) maupun KPA. Evaluasi situasi tahun 2007 menyebutkan adanya indikasi bias gender pada mekanisme proyek pengembangan Kecamatan (PPK) dan yang langsung dikelola oleh BRA dengan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Forbes (Forum Bersama). Ini merupakan salah satu sebab terjadinya distorsi peran perempuan. Distorsi lainnya adalah kurangnya pengakuan terhadap *inong balee* sebagai bagian dari *Teuntra Nanggroe Atjeh* (TNA), seperti tidak ada nama perempuan *inong balee* sebagai bagian dari TNA yang menerima kompensasi. GAM sendiri dalam publikasinya, mengakui bahwa mereka mempunyai pasukan perempuan yang bukan hanya bekerja di garis belakang namun juga ikut berperang bersama laki-laki lain. Juga lihat wawancara di atas dengan Adek. Kisah Adek menunjukkan bahwa perempuan juga berada pada garis depan. Menjadi pembina perang dan memimpin pasukan dalam peperangan.

Kemudian mari kita lihat dalam struktur BRA seperti yang tertuang dalam website tahun 2008. Dari 80 orang yang duduk dalam struktur BRA, 15% nya adalah perempuan atau sekitar 12 orang. Ini menunjukkan peran perempuan masih belum sangat kurang, karena setidaknya peran perempuan yang dianjurkan adalah 30% sehingga pengambilan keputusan dapat selalu berperspektif pada kebutuhan perempuan. Salah satu contoh yang memprihatinkan adalah minimnya bantuan yang ditujukan secara langsung pada *inong balee* ada tahun 2007.

⁴ Waspada online, 18 Juni 2007

Dari sisi penerima manfaat, sampai saat ini belum ada bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar bagi para perempuan mantan kombatan atau *inong balee*. Data 3.000 nama eks-kombatan yang tertuang dalam MoU Helsinki merupakan jumlah politis yang tidak dapat diuraikan segregasi laki-laki dan perempuan. Bahkan, implikasi dari jumlah tersebut sampai saat ini belum ada bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar mereka. Baru awal tahun 2007 pihak KPA mengajukan data tambahan sebanyak 6200 orang lagi, dimana sekitar 30 % adalah untuk Inong balee atau setara dengan 1680 orang.

Tidak adanya segregasi (data terpilah) dan indikator gender menjadi faktor yang menyulitkan bagi BRA dalam melaksanakan tugasnya. Pada akhirnya masyarakat juga kesulitan dalam mendapat informasi bagaimana kelompok rentan seperti perempuan, anak, orang tua dan orang cacat dapat menerima manfaat dari proses reintegrasi. Program-program yang ditujukan pada perempuan pun belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dituturkan oleh BRA sendiri pada sebuah media bahwa hingga tahun 2007 program pemberdayaan perempuan belum maksimal dijalankan dan BRA berjanji akan menjadikan prioritas pada tahun 2008.

Evaluasi situasi perempuan tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Gender Working Group menyatakan bahwa proses reintegrasi cenderung sebatas pemberian kompensasi dana, sementara tidak dibarengi dengan pemulihan trauma korban kekerasan terhadap perempuan.⁵ Catatan komnas perempuan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa terjadi pengabaian terhadap korban kekerasan perempuan dalam konflik. Pada tahun 2006 saja, ada sekitar 100 kasus kekerasan terhadap wanita yang dilaporkan selama konflik dan pasca konflik.⁶ Namun, dalam masa reintegrasi kasus-kasus ini seolah-olah tidak menjadi prioritas dalam penanganan reintegrasi.

Unifem juga menyebutkan bahwa MoU Helsinki tidak mendudukan perempuan sebagai salah satu hal yang diakui keberadaannya. Akibatnya, turunan dari MoU Helsinki baik dari sisi kebijakan maupun implementasi reintegrasi yang dikoordinasikan oleh BRA tidak memprioritaskan perempuan sebagai subyek dan juga penerima manfaat baik dari pihak Pemerintah maupun GAM. Beberapa keterangan tersebut mengidikasikan secara kuat bahwa perempuan telah terpinggirkan dalam reintegrasi Aceh baik dalam hal penerima manfaat reintegrasi, kasus-kasus trauma dan tindak lanjut penegakan hukum bagi perempuan yang teraniaya pada masa konflik.

Di sisi lain, ada juga perempuan yang tidak mempunyai akses kedua belah pihak. Dalam masa konflik mereka melakukan kerja-kerja sebagai negosiator bagi orang hilang dan tertangkap, bimbingan/konseling pada korban perempuan, kemudian ada juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak penguasa dalam hal penyampaian aspirasi perempuan, serta peran pendampingan hukum bagi perempuan yang hak-haknya dianiaya. Sayangnya perempuan yang dulunya dan mungkin sampai sekarang terlibat pada kerja-kerja tersebut seakan-akan terpisah dengan kerja-kerja reintegrasi.

⁵ Disadur dari Evaluasi Situasi Tahun 2007, GWG: "Seorang perempuan di Aceh Timur menyampaikan bahwa dengan tidak dianggap sebagai anggota GAM, maka tidak ada akses bagi mereka menceritakan keluhan-keluhan mereka, sementara penyembuhan trauma adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan, begitu juga penyembuhan fisik akibat kekerasan yang mereka alami."

⁶ Majalah Amana, 5 September 2007

Bila ditinjau lebih jauh, kompetensi perempuan-perempuan tersebut sudah diakui pada masa konflik. Mereka banyak berhubungan dengan berbagai pihak. Hasil wawancara dengan salah satu aktifis perempuan dari Aceh Besar (2008), perempuan ini melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam hal mencari dan membebaskan orang-orang yang hilang dan tertangkap. Kerja-kerjanya berhubungan dengan berbagai pihak seperti Tentara, Polisi, GAM, pihak Palang Merah dan berbagai pihak yang memungkinkan orang yang dicari berada. Dan nyatanya hubungan dia dengan berbagai pihak tersebut berjalan dengan cukup sukses. Ini menunjukkan bahwa penerimaan para pihak terhadap perempuan cukup baik sebagai mediator dalam memecahkan kasus-kasus tersebut.

Begitupun dengan perempuan yang terlibat dalam kerja-kerja pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus pengaduan mereka kumpulkan, kemudian memberikan bimbingan serta konseling terhadap korban yang trauma. Selanjutnya mereka juga mendorong kasus-kasus ini pada meja hukum. Kerja-kerja seperti ini pada masa konflik kurang begitu diperhatikan karena memang dalam situasi konflik seperti itu, masalah kekerasan menjadi masalah umum dan cenderung diabaikan. Saat ini kondisi damai, masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan pada masa konflik sudah mendapat ruang untuk diteruskan di meja hukum. Namun demikian, kerja-kerja perempuan ini masih belum terakomodasi dalam proses reintegrasi.

Kebijakan Badan Reintegrasi Damai Aceh telah memberi arah yang jelas bahwa program yang diimplementasikan haruslah dapat dipastikan tercantumnya aspek gender mainstreaming. Dituangkannya aspek ini dengan maksud akan terjadi komposisi yang berimbang antara penguatan sosial, ekonomi dan budaya tidak hanya pada laki-laki tetapi juga perempuan. Tugas ini tercermin dalam tugas-tugas yang harus dijalankan BRA. Bila melihat ke belakang lagi, sangatlah pantas dan elok jika perempuan saat ini layak mendapat tempat yang proporsional dengan laki-laki dimana peran dan resiko yang ditanggung dan diderita perempuan pada masa konflik relatif sama.

4.3 Peran-peran Perempuan Aceh dalam Mengisi Perdamaian

Bila ditelaah satu persatu maka banyak sekali peran yang dilakukan perempuan dalam mengisi perdamaian. Setelah masa konflik yang panjang, saat ini Aceh dalam kondisi damai. Namun demikian perdamaian yang dimaksudkan saat ini adalah tidak sekedar berhenti kontak senjata tetapi makna damai lebih luas dari itu. Mendorong suatu pembangunan baik fisik maupun non fisik merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap perdamaian. Ranah aktivitasnya pun beragam, seperti kerja-kerja di parlemen, birokrasi, institusi-institusi negara seperti BRA, KIP, LSM, pengiat ekonomi dan lain sebagainya.

Kiprah perempuan di parlemen, menurut data yang diperoleh MISPI dari 1054 caleg yang masuk, 304 caleg adalah perempuan. Secara kuota sudah memenuhi kuota 30 persen untuk calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Namun bila ditelisik lebih jauh pada nomor urut partai ternyata caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1 sangat sedikit. Dari 304 caleg perempuan, hanya ada 34 perempuan yang mendapat nomor urut 1, 61 orang di nomor urut 2, dan 74 orang di nomor urut 3. Disebutkan lagi hanya ada 22 partai yang berani menempatkan perempuan di nomor urut 1, 31 partai menempatkan

perempuan di nomor urut 2, dan 29 partai menempatkan perempuan di nomor urut 3. Meski demikian, Keputusan MK yang atas pemilu 2009 tentang suara terbanyak, tidak berpengaruh lagi pada penempatan nomor urut. Dan keputusan MK ini dinilai sangat mengakomodir kepentingan perempuan.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kiprah perempuan juga bergerak pada kerja advokasi isu perempuan. Organisasi perempuan yang bergerak dalam ranah itu antara lain Flower Aceh, LKBHWK, RPUK, Kontras, Beujroh, MISPI dan banyak lagi lainnya. Ada juga yang berkiprah pada organisasi jaringan seperti KKTGA, Balai Syura Ureung Inong Aceh, JPUK dan lain sebagainya. Jenis isu yang dikelolanya pun berbeda-beda, diantaranya mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan dalam rumah tangga, korban kekerasan pada masa konflik, konseling dan lain-lain. Peran sebagian dari mereka sebagai akademisi di beberapa perguruan tinggi di Aceh juga masih tetap dijalankannya.

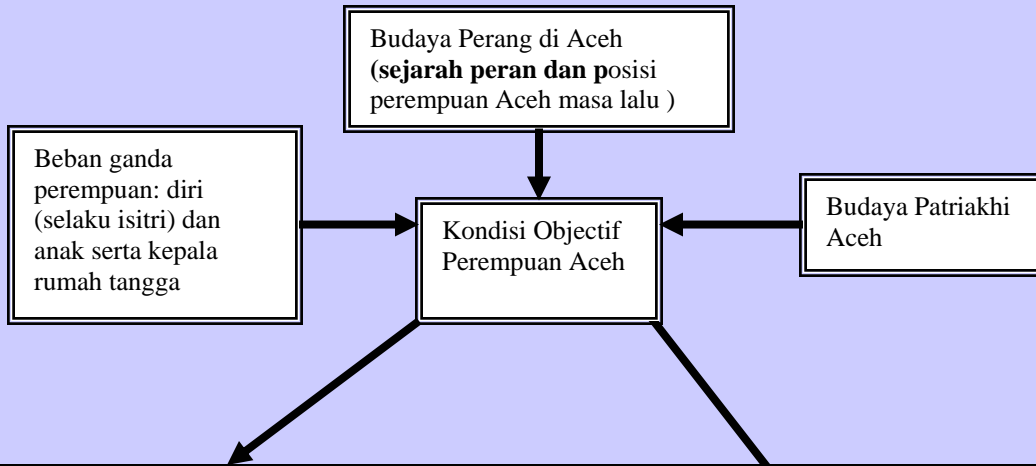
Seperti contoh Maryati, dirinya terlibat dalam proses CoHA dan perundingan di Helsinki, saat ini masih masih berkiprah dalam dunia aktifis gerakan masyarakat sipil. Sering hadir pada momentum-momentum perdamaian dan pemberi masukan atas masalah-masalah Aceh. Dia juga selaku akademisi pada IAIN Arraniry di Banda Aceh. Dia juga melakukan beberapa pertemuan di luar negeri untuk membicarakan masalah Aceh. Maryati juga mendirikan lembaga yang bertujuan untuk mempertahankan perdamaian. Selain itu Maryati juga banyak menulis artikel-artikel tentang perempuan dan perdamaian serta kampanye di media masa.

Samsidar, sebagai contoh sosok aktifis dalam bidang HAM, hingga saat ini masih tetap berbuat sesuatu untuk Aceh dalam mengisi perdamaian. Dirinya terlibat di ICTJ. Upayanya mencoba agar orang memandang perdamaian yang lebih luas, mendorong adanya KKR, membuat data base. Itu terus-menerus didorong. "DOM dicabut di Aceh salah satunya adalah karena ketika perempuan bertestimoni," katanya lagi. Bahwa cukup besar penderitaan perempuan akibat kekerasan seksual. Tapi ketika bantuan datang, mereka termarginalkan. Atas hal tersebut, hingga saat ini Samsidar tetap menggugat, menggugat soal korban dimasa lalu, khususnya soal korban kekerasan seksual. Padahal ketika orang berbicara *rumoh gedong* (rumah yang disinyalir sebagai tempat penyiksaan) misalnya, orang selalu berbicara masalah perkosaan dan perbudakan seksual.

Sekarang, Samsidar dan beberapa lembaga perempuan lain di Aceh seperti PASKA ICTJ, RPUK, Balai Syura, Komnas perempuan dan lain-lain, saat ini sedang membuat gagasan sebuah konsep mengenai reparasi perempuan korban seksual yang sedang diusulkan bekerjasama dengan BRA. Dan masih banyak lagi kiprah perempuan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penyusunan buku ini sehingga diharapkan ada perbaikan-perbaikan ke depan untuk lebih menyempurnakan dokumen ini.

Perempuan dan Perdamaian di Aceh

Kondisi Perempuan Aceh

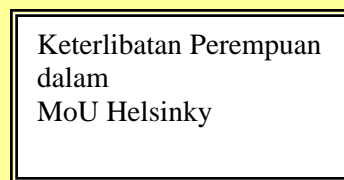


Kondisi konflik



Musibah Tsunami

Periode rehab-rekon



Kondisi Damai

